



Katalog BPS: 4901.

# STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN



SUMBER DATA  
STUDI PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) 2003

**BPS**

BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA-INDONESIA

**STATISTIK  
POLITIK DAN KEAMANAN  
TAHUN 2005**

<http://www.bps.go.id>

**SUMBER DATA  
STUDI PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG PEMILIHAN KEPALA  
DAERAH (PILKADA) 2005**



## KATA PENGANTAR

---

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2005 ini merupakan terbitan keempat yang secara rutin dikerjakan oleh Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, Badan Pusat Statistik. Publikasi ini akan berbeda pada setiap edisi berdasarkan topik tertentu yang menarik untuk disajikan.

Sumber data terbitan 2005 ini merujuk pada hasil Studi Pendapat Masyarakat tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang telah dilaksanakan di 3 (tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat pada Bulan Oktober 2005. Wawancara terhadap masyarakat dilakukan secara langsung dengan pertanyaan terstruktur. Selain itu, wawancara secara mendalam juga dilakukan dengan nara sumber dari kalangan birokrat seperti KPUD, Panwaslih, dan tokoh masyarakat.

Publikasi ini terwujud berkat adanya kerja sama seluruh staf Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, BPS. Ucapan terima kasih kami sampaikan atas dedikasi mereka juga kepada rekan-rekan di BPS daerah yang terkait dalam kegiatan ini, serta semua pihak yang secara aktif memberikan sumbangsih hingga terbitnya publikasi ini.

Demi perbaikan publikasi di masa mendatang, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Desember 2005

Kepala Badan Pusat Statistik

DR. CHOIRIL MAKSUM  
NIP. 340003890

<http://www.bps.go.id>

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v
Daftar Tabel .....	vii
Daftar Gambar .....	ix
1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Dasar Hukum Pilkada 2005 .....	2
1.3. Daerah yang Melaksanakan Pilkada 2005 .....	4
1.4. Maksud dan Tujuan Studi .....	6
2. METODOLOGI .....	7
2.1. Cakupan Wilayah .....	7
2.2. Metode Pemilihan Wilayah .....	7
2.3. Pemilihan Rumah Tangga dan Responden .....	8
2.4. Metode Pengumpulan Data .....	9
2.4.1. Wawancara Langsung dengan Kuesioner Terstruktur .....	9
2.4.2. Metode Studi Mendalam (Indepth Study) .....	10
3. LATAR BELAKANG RESPONDEN .....	13
3.1. Keterangan Demografi Responden .....	13
3.2. Latar Belakang Sosial dan Ekonomi Responden .....	15
3.3. Latar Belakang Politik dan Organisasi Massa Keagamaan Responden .....	17
4. PERAN SERTA MASYARAKT DALAM TAHAPAN PILKADA .....	21
4.1. Tahap Sosialisasi dan Pendaftaran Pemilih .....	21
4.2. Tahap Kampanye .....	30
4.3. Pencoblosan dan Penghitungan Suara .....	34
4.3.1. Pilkada Gubernur .....	34
4.3.2. Pilkada Wali Kota Solok .....	36
4.3.3. Pilkada Bupati Tanah Datar .....	37
4.4. Kondisi Keamanan Selama Pilkada .....	39
5. SIKAP DAN HARAPAN MASYARAKAT TERHADAP KEPALA DAERAH TERPILIH .....	43
5.1. Sikap dan Harapan Masyarakat terhadap Gubernur Terpilih .....	43
5.2. Sikap dan Harapan Masyarakat terhadap Bupati/Wali Kota Terpilih .....	46
6. KESIMPULAN .....	51
Daftar Pustaka .....	57
Lampiran 1 Daerah yang Telah Melaksanakan Pilkada .....	59
Lampiran 2 Kuesioner SPM-KD2005 .....	63
Lampiran 3 Pedoman Pengisian Kuesioner SPM-KD2005 .....	67

<http://www.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1. Alokasi Sampel Rumah Tangga dan Responden menurut Wilayah ...	9
3.1. Persentase Responden menurut Karakteristik Demografi .....	14
3.2. Persentase Responden menurut Latar Belakang Sosial dan Ekonomi .....	16
3.3. Persentase Responden menurut Afiliasi Partai Politik .....	18
3.4. Persentase Responden menurut Keanggotaan dalam Ormas Keagamaan.....	19
4.1. Persentase Responden menurut Waktu Pertama Kali Mengetahui Pilkada.....	23
4.2. Persentase Responden menurut Sumber Mendapatkan Informasi Mengenai Pilkada.....	25
4.3. Persentase Responden yang Pernah Melihat Spanduk/Baliho Tentang Pilkada menurut Tempat Pemasangannya .....	25
4.4. Persentase Responden yang Menghadiri Kampanye menurut Kelompok Umur dan Tingkat Pendidikan .....	32
4.5. Persentase Responden yang Menghadiri Kampanye menurut Jenis Kampanye yang Diikuti .....	33
4.6. Persentase Responden menurut Pendidikan dan Alasan Memilih Calon Gubernur/Wakil Gubernur .....	35
4.7. Persentase Responden menurut Pendidikan dan Alasan Memilih Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Solok .....	37
4.8. Persentase Responden menurut Pendidikan dan Alasan Memilih Calon Bupati/Wakil Bupati Tanah Datar .....	38

<http://www.bps.go.id>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1. Diagram Alir Pelaksanaan Pilkada Tahun 2005 .....	5
1.2. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan Tahun 2003 .....	15
3.1. Piramida Partisipasi Politik .....	19
4.1. Persentase Responden yang Mengetahui Tentang Pelaksanaan Pilkada .....	23
4.2. Persentase Responden yang Mengetahui Masa Pendaftaran dan yang Terdaftar Sebagai Pemilih.....	26
4.3. Persentase Responden Terdaftar menurut Waktu Didaftar .....	27
4.4. Persentase Responden yang Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih menurut Alasan dan Jenis Pemilihan .....	28
4.5. Persentase Responden yang Mengetahui Jumlah Pasangan Calon Kepala Daerah.....	28
4.6. Persentase Responden menurut Pengetahuan Partai-partai yang Mencalonkan Kepala Daerah.....	29
4.7. Persentase Responden yang Tidak Mengetahui Partai yang Mendukung Pasangan Calon wali Kota Solok menurut Pendidikan .....	30
4.8. Persentase Responden yang Pernah Menghadiri/Mengikuti Kampanye .....	31
4.9. Persentase Responden yang Menghadiri Kampanye menurut Sikap Setelah Kampanye.....	33
4.10. Persentase Responden menurut Pengetahuan Ada Tidaknya Gangguan Keamanan Pada Saat Pilkada .....	40
5.1. Persentase Responden menurut Prioritas Harapan terhadap Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih.....	46
5.2. Persentase Responden menurut Prioritas Harapan terhadap Walikota/wakil walikota Terpilih .....	47
5.3. Persentase Responden menurut Prioritas Harapan terhadap Bupati/Wakil Bupati Terpilih .....	49

**1.1. Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia yang menuntut adanya keterbukaan, pemerintah membuka peluang terlaksananya pemilihan yang lebih demokratis yaitu melakukan pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh rakyat. Pemilihan tersebut diharapkan dapat mengembalikan makna dari demokrasi yang sesungguhnya yaitu bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1955.

Pemilihan pemimpin secara langsung oleh rakyat sudah dilaksanakan pada saat pemilihan presiden/wakil presiden beberapa waktu lalu. Pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden yang dilakukan secara langsung merupakan pengalaman pertama bagi rakyat Indonesia untuk memilih orang nomor 1 di Republik Indonesia.

Pemilihan kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) selama ini dilakukan oleh anggota legislatif (DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota). Pemilihan tersebut dilakukan melalui pemungutan suara (*voting*). Calon kepala daerah yang mendapat suara yang paling banyak kemudian dilantik sebagai kepala daerah. Seperti halnya pemilihan presiden/wakil presiden, sejak bulan Juni 2005 untuk menetapkan kepala daerah (gubernur/bupati/wali kota) dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Pemerintah dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung diharapkan mampu melahirkan pemimpin-pemimpin daerah yang mewakili suara rakyat. Sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No.6 Tahun 2005. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dapat dicatat sebagai langkah awal kemajuan pembangunan demokratisasi di Indonesia yaitu dengan mengajak masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpinnya sendiri.

Sebagai pertimbangan pentingnya dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung menurut Menteri Dalam Negeri (Kompas; 22 Juli 2005) ada lima hal yang mendasarinya, yaitu pertama merupakan jawaban atas tuntutan rakyat untuk melaksanakan demokrasi, kedua merupakan perwujudan konstitusi dan UUD 1945, ketiga merupakan sarana pembelajaran demokrasi/politik bagi rakyat, keempat

sebagai sarana memperkuat otonomi daerah, kelima sebagai sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan daerah.

Meskipun komponen penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung sudah siap melaksanakannya, namun ada beberapa persoalan yang perlu diinformasikan kepada masyarakat, seperti: apakah rakyat sudah siap dengan pemilihan kepala daerah tersebut, apa yang menjadi dasar bagi rakyat untuk memilih atau mempertimbangkan seorang menjadi kepala daerah, dan bagaimana masyarakat dapat memahami mekanisme pemilihan kepala daerah (sosialisasi).

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka Subdit Statistik Politik dan Keamanan, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, ingin mengetahui dari masyarakat yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah secara langsung melalui Studi tentang Partisipasi dan Persepsi Masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2005.

## **1.2. Dasar Hukum Pilkada**

Pemilihan umum baik dalam rangka pemilihan anggota DPR, DPRD, DPD serta presiden dan wakil presiden, maupun pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, mempunyai tujuan membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Tahun 1945. Tujuan tersebut sejalan dengan amanat reformasi yang menghendaki bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih mampu menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Hal tersebut telah dibuktikan dengan terpilihnya presiden dan wakil presiden yang untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa dipilih secara langsung oleh rakyat.

Untuk dapat mewujudkan maksud sebagaimana tujuan pemilihan umum sebagaimana uraian di atas, maka dibutuhkan dasar hukum dan peraturan pelaksanaan yang dapat mengakomodasikan aspirasi rakyat Indonesia yang majemuk. Adapun dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah diawali dengan disahkannya UU. No.12 Tahun 2003, yakni dalam rangka membentuk KPUD, yang terdiri dari KPUD Provinsi dan KPUD kab/kota. Kemudian melalui UU. No. 32 Tahun 2004 KPUD dimaksud diberi wewenang khusus untuk menyelenggarakan pemilihan di Provinsi, kabupaten/kota dan dalam rangka

melaksanakan pemilihan langsung kepala daerah dan wakil kepala daerah dikeluarkan lagi peraturan pemerintah yaitu PP No. 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hal-hal yang sangat perlu untuk diketahui dari UU No.6 Tahun 2005, bahwa DPRD, Kepala Daerah dan KPUD merupakan 3 (tiga) pilar utama penggerak penyelenggaraan pemilihan langsung kepala daerah. Tugas pertama datangnya dari DPRD yakni dengan membuat surat pemberitahuan batas berakhirnya masa jabatan kepala daerah, kepada kepala daerah dan KPUD, lima bulan sebelumnya {PP.No. 6 Tahun 2005, pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b}

Setelah surat pemberitahuan batas berakhirnya masa jabatan kepala daerah diterima, paling lambat 30 hari, kepala daerah sudah harus menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan laporan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD {PP.No. 6 Tahun 2005, pasal 3 ayat (1)} Sedangkan untuk KPUD, setelah mendapat surat pemberitahuan masa berakhirnya jabatan kepala daerah sudah harus menetapkan/melaksanakan beberapa kegiatan yang antara lain sebagai berikut:

- a. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, paling lambat 14 hari setelah surat tersebut diterima {PP.No. 6 Tahun 2005, pasal 3 ayat (2) huruf a }
- b. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS paling lambat 21 hari setelah surat tersebut diterima {PP.No. 6 Tahun 2005, pasal 3 ayat (2) huruf b}.
- c. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilkada.
- d. Menerima dan menseleksi berkas calon pasangan kepala daerah yang mendaftar
- e. Menetapkan pasangan calon yang lolos.
- f. Melaksanakan sosialisasi Pilkada kepada masyarakat
- g. Melaksanakan pendaftaran pemilih dsb.

DPRD (DPRD provinsi untuk pemilihan gubernur dan DPRD kab/kota untuk pemilihan bupati/wali kota) membentuk panitia pengawas pemilihan yang dikenal dengan Panwas Pilkada, yang beranggotakan 5 orang, terdiri dari unsur

kepolisian, kejaksanaan, perguruan tinggi, pers dan tokoh masyarakat. Pada tingkat kecamatan jumlah anggota Panwas Pilkada sebanyak 3 orang dari unsur yang sama dengan Panwas provinsi maupun kabupaten/kota. Pengangkatan Panwas kecamatan ini atas usul oleh Panwas kabupaten/kota.

Gambaran secara garis besar dari beberapa tahapan kegiatan sebagaimana uraian di atas, yang nantinya dilaksanakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung (Pilkada 2005) yang ringkasannya, secara garis besar dapat dilihat pada Gambar 1.1.

### **1.3. Daerah Yang Melaksanakan Pilkada 2005**

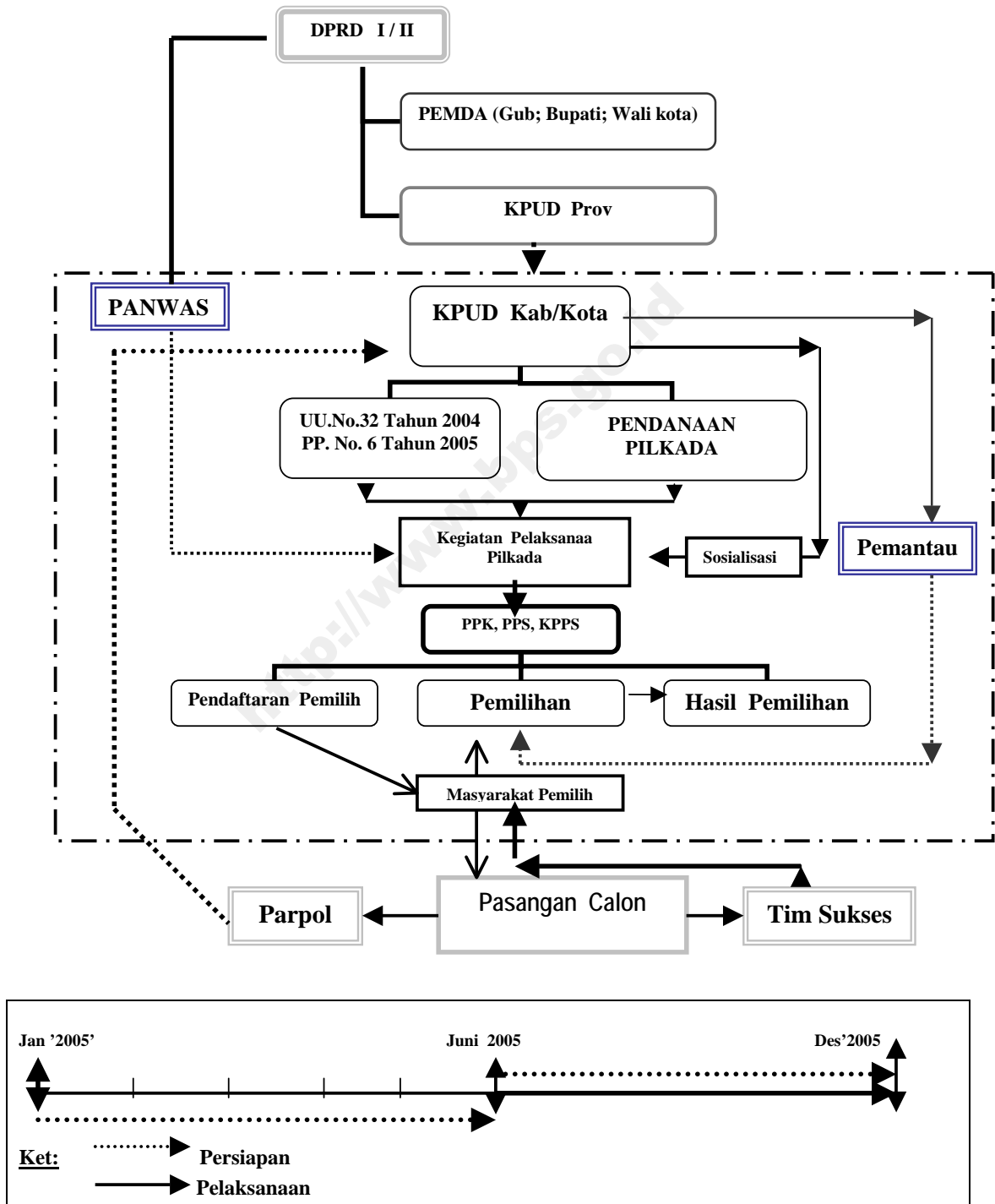
Bersandarkan pengalaman pemilu 2004, persoalan pokok yang perlu untuk diperhatikan sebagai langkah awal pelaksanaan Pilkada secara langsung adalah masalah pendaftaran pemilih. Hal ini penting mengingat jumlah pemilih hanya bisa diperoleh bila dilaksanakan kegiatan pendaftaran pemilih atau penduduk sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh KPU menjelang pemilu 2004 lalu. Kegiatan tersebut dikenal dengan sebutan P4B atau Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan yang sepenuhnya dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.

Mengingat waktu yang relatif singkat bagi daerah yang melaksanakan Pilkada di tahun 2005 ini, maka pelaksanaan pendaftaran pemilih harus dilaksanakan sejak dikeluarkannya dasar hukum pelaksanaan Pilkada. Langkah terbaik untuk mempermudah dan mempercepat proses pendaftaran pemilih adalah menggunakan data acuan yang bersumber dari P4B. Berdasarkan kenyataan ini maka pada daerah-daerah yang melaksanakan Pilkada pada tahun 2005, sengaja ditampilkan data pemilih hasil P4B dan hasil pendaftaran pemilih pada pelaksanaan Pilkada 2005 untuk digunakan sebagai gambaran perubahan penduduk atau pemilih.

Hal ini penting, mengingat pelaksanaan Pilkada 2005, merupakan suatu ajang ujian pembelajaran demokrasi bagi rakyat Indonesia, dan merupakan aksi peduli terhadap hak azasi seorang manusia yang pada akhirnya akan membentuk kedaulatan murni yang berada di tangan rakyat. Oleh sebab itu kesuksesan Pilkada merupakan suksesnya pemahaman tentang arti demokrasi bagi rakyat

Indonesia, dan sukses ini tentunya akan berdampak baik bagi bidang-bidang lain, terutama pada tegaknya supremasi hukum secara lebih merata di Indonesia.

**Gambar 1.1. Diagram Alir Pelaksanaan Pilkada Tahun 2005**  
(Sesuai UU No. 32 dan PP. No.6 Tahun 2005)



Pada tahun 2005 terdapat sebanyak 226 daerah di Indonesia, yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung. Dari 226 daerah tersebut, 11 daerah melaksanakan pemilihan Gubernur, dan 215 daerah melaksanakan pemilihan bupati dan wali kota. Untuk pemilihan bupati, terdapat di 179 kabupaten, sedangkan untuk wali kota terdapat di 36 kota (lihat Lampiran 1).

#### **1.4. Maksud dan Tujuan Studi**

Adapun maksud dan tujuan dari studi pendapat masyarakat tentang pemilihan kepala daerah adalah:

1. Mengetahui pengetahuan masyarakat tentang pemilihan bupati/wali kota dan gubernur,
2. Mengetahui karakteristik demografi dari: orang yang menggunakan hak pilih, orang yang tidak menggunakan hak pilih dan orang yang tidak terdaftar dalam pemilihan bupati/wali kota dan gubernur,
3. Mengetahui kesiapan masyarakat dalam berdemokrasi,
4. Mengetahui motivasi masyarakat yang berpartisipasi dalam pemilihan bupati/ wali kota dan gubernur,
5. Mengetahui perilaku kader partai dan massa mengambang dalam pemilihan bupati/wali kota dan gubernur,
6. Mengetahui kemungkinan konflik yang terjadi selama proses dalam pemilihan bupati/wali kota dan gubernur.

### **2.1. Cakupan Wilayah**

Studi ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Barat pada tiga kabupaten/kota yang telah melaksanakan Pilkada 2005 dengan sampel sebanyak 1000 responden. Studi untuk pemilihan wali kota/wakil wali kota dilaksanakan di Kota Solok sebanyak 400 responden, untuk pemilihan bupati/wakil bupati di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 400 responden, dan untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur selain di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Solok masing-masing 400 responden juga di Kota Padang sebanyak 200 responden.

Data yang dicakup pada studi ini terbatas pada persepsi masyarakat baik individu maupun kelompok, tetapi tidak termasuk persepsi dari partai politik secara kelembagaan. Persepsi meliputi kegiatan tahapan pelaksanaan Pilkada 2005 yang dimulai dari pendaftaran pemilih, sosialisasi, kampanye, waktu pelaksanaan pencoblosan sampai pada penghitungan suara.

### **2.2. Metode Pemilihan Wilayah**

Pemilihan Provinsi Sumatera Barat sebagai wilayah studi dilakukan secara purposif. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang telah melakukan Pilkada langsung untuk gubernur dan sebagian besar wilayah kota/kabupaten di Provinsi ini telah melakukan Pilkada untuk memilih wali kota/bupati. Kota/kabupaten yang telah melakukan Pilkada diantaranya adalah: Kota Solok, Kabupaten Solok, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Darmas Raya, Kabupaten Agam, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung dan Kabupaten Tanah Datar.

Pada studi ini dipilih Kota Solok untuk mewakili pemilihan wali kota, Kabupaten Tanah Datar untuk mewakili pemilihan Bupati, dan Kota Padang untuk pemilihan gubernur. Pada wilayah Kota Solok dan Kabupaten Tanah Datar, selain ditanyakan informasi terkait Pilkada wali kota/bupati juga ditanyakan informasi tentang Pilkada gubernur. Untuk dapat menggambarkan kondisi lapangan Pilkada secara lebih bertanggung jawab maka keterkaitan penentuan



ukuran sampel tiap wilayah pemilihan perlu mempertimbangkan kaedah-kaedah sampling.

Cochran (1991) menuliskan rumus untuk ukuran sampel  $n$  dalam penarikan sampel proporsi dengan batas kesalahan  $d$  dalam memperkirakan proporsi  $p$  dan memiliki risiko  $\alpha$  adalah:

$$n_0 = \frac{t^2 pq}{d^2},$$

$t$  merupakan absis dari kurva normal yang memotong daerah  $\alpha$  pada sisi-sisinya. Kemudian  $n$  minimum diperoleh dengan rumus:

$$n = \frac{n_0}{1 + \left(\frac{n_0}{N}\right)}$$

Untuk  $N$  besar,  $n_0/N$  dapat diabaikan sehingga  $n_0$  merupakan perkiraan untuk  $n$  yang mewakili. Dengan demikian  $n = n_0 = \frac{t^2 pq}{d^2}$ . Dengan menetapkan  $d=0,05$ , proporsi art yang *eligible* ( $p$ ) dalam rumah tangga = 0,5 (untuk mendapatkan ukuran sampel maksimum),  $\alpha = 0,05$ ,  $t = 2$  dan diasumsikan  $p$  berdistribusi normal. Ketentuan ini menghasilkan sampel minimum sebesar 400. Karena itu, untuk keperluan studi ini ditentukan sampel sebanyak 400 rumah tangga masing-masing, untuk Kabupaten Tanah Datar dan Kota Solok. Sedangkan untuk Kota Padang jumlah sampel ditentukan sebanyak 200 rumah tangga.

Dari setiap rumah tangga sampel masing-masing dipilih dua responden, yaitu *eligible sample* yang berumur paling tua dan paling muda. Dengan demikian diperoleh jumlah sampel responden untuk pemilihan bupati dan wali kota masing-masing sebanyak 800 responden, sedangkan untuk pemilihan gubernur sebanyak 2 000 responden. Besarnya sampel responden 2.000 orang untuk pemilihan gubernur, berasal 800 responden di Kabupaten Tanah Datar, 800 responden di Kota Solok dan 200 responden di Kota Padang.

### **2.3. Pemilihan Rumah Tangga dan Responden**

Dari setiap blok sensus terpilih yang berjumlah 50 blok, dipilih 20 rumah tangga. Pemilihan rumah tangga menggunakan metode *linear systematic sampling* dengan interval banyaknya jumlah rumah tangga (hasil updating pemetaan terakhir) dalam blok sensus dibagi dengan 20. Rumah tangga sampel

pertama (*starting point*) ditetapkan rumah tangga yang terletak di ujung barat daya di suatu blok sensus terpilih. Pemilihan rumah tangga sampel kedua terletak di sebelah timur rumah tangga sampel pertama dengan jarak sebesar interval. Demikian seterusnya, rumah tangga sampel berikutnya ditentukan di sebelah timur dengan jarak sebesar interval sehingga terpilih sebanyak 20 rumah tangga.

Tahap terakhir yaitu penentuan responden dari setiap rumah tangga. Dari setiap rumah tangga terpilih, dipilih dua orang yang memenuhi syarat menjadi responden yaitu orang yang tinggal di rumah tangga terpilih yang pada hari pemungutan suara telah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah, dengan ketentuan:

1. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
2. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara.

Dua orang yang dipilih adalah satu orang yang berumur paling tua dan satu orang yang berumur paling muda.

**Tabel 2.1. Alokasi Sampel Rumah Tangga dan Responden menurut Wilayah**

Kota/Kabupaten	Kecamatan	Desa		Blok Sensus		Jumlah sampel	Jumlah responden
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kota Padang	10	10	-	10	-	200	400
Kota Solok	2	12	1	19	1	400	800
Kabupaten Tanah Datar	14	7	13	7	13	400	800

## **2.4. Metode Pengumpulan Data**

### **2.4.1. Wawancara Langsung dengan Kuesioner Terstruktur**

Dalam melaksanakan studi khusus terhadap persepsi masyarakat tentang Pilkada 2005, pengumpulan datanya dilaksanakan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan melalui wawancara mendalam dengan bentuk pertanyaan yang terbuka tidak terstruktur dan pendekatan melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner terstruktur.

Kuesioner terstruktur dalam wawancara langsung umumnya memuat cara-cara pengisian kuesioner secara tegas dan sangat jelas. Maksudnya agar dengan mudah para pewawancara dapat mengikuti alur pertanyaan, dapat mengerti maksud dari pertanyaan, dapat mengisi jawaban hasil wawancara secara baik dan benar.

Untuk itu pewawancara perlu memiliki disiplin yang tinggi, rasa percaya diri, jujur, penuh kesabaran, sopan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, agar data yang dihasilkan tidak terlalu bervariasi dari tujuan pengumpulan data atau tujuan survei. Biasanya pengumpulan data dengan kuesioner terstruktur yang dilaksanakan dengan pendekatan wawancara langsung untuk menggali berbagai keterangan dari responden, dan waktu yang dibutuhkan umumnya sekitar 7 sampai 10 hari. Karena kondisi pengumpulan data kuantitatif yang umumnya demikian, maka biasanya diperlukan pewawancara yang berasal/bermukim sekitar daerah studi. Berdasarkan kenyataan tersebut maka umumnya ditetapkan petugas di daerah sebagai pelaksananya.

#### **2.4.2. Metode Studi Mendalam (*Indepth Study*)**

Studi mendalam adalah upaya pencarian pemahaman yang mendalam dan alamiah mengenai suatu obyek studi, khususnya yang berkaitan dengan gejala, perilaku, dan atau proses sosial<sup>7</sup>. Mendalam mempunyai pengertian bahwa dengan studi mendalam dapat diperoleh suatu informasi yang utuh, tidak parsial dan kontekstual. Sedangkan alamiah mengandung pengertian bahwa informasi yang dikumpulkan berdasarkan keadaan di lapangan tempat gejala atau proses obyek studi berlangsung, tanpa dipengaruhi pemahaman/persepsi awal dari peneliti.

Dalam pelaksanaan studi mendalam sering kali menggunakan kombinasi metode pengamatan dan wawancara mendalam. Berkaitan dengan penelitian ini, studi mendalam yang dilakukan adalah wawancara mendalam karena pelaksanaan tahapan Pilkada 2005 telah selesai dilaksanakan. Wawancara mendalam merupakan suatu upaya memasuki dunia orang lain untuk memahami perspektif orang yang menjadi obyek wawancara.

---

<sup>7</sup> Bagian Analisis dan Pengembangan Statistik Kependudukan, Pedoman Umum Studi Mendalam, Jakarta, 1998

Karena itu, wawancara mendalam melibatkan kegiatan mengajukan pertanyaan terbuka, mendengarkan dan mencatat jawaban. Berkaitan dengan hal tersebut seorang pewawancara mendalam (peneliti) membutuhkan keahlian, kepekaan, konsentrasi, mental dan disiplin yang kuat. Adapun sasaran wawancara atau informan pada studi mendalam dalam penelitian ini dipilih dari kalangan KPUD, Panwaslu, LSM, pemantau Pilkada, KPPS, tokoh masyarakat/agama, dan partai politik.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Bab ini membahas karakteristik dan latar belakang responden. Hasil studi menunjukkan bahwa studi ini mencakup masing-masing 797 responden untuk Pilkada bupati (Kabupaten Tanah Datar) dan wali kota (Kota Solok), dan 1 994 responden untuk Pilkada gubernur. Pembahasan karakteristik responden dikelompokkan menjadi tiga klasifikasi yaitu keterangan demografi responden, latar belakang sosial dan ekonomi responden, dan latar belakang afiliasi politik dan keanggotaan ormas keagamaan responden. Keterangan demografi meliputi umur, jenis kelamin, status perkawinan dan keterangan migrasi. Latar belakang sosial dan ekonomi meliputi suku bangsa, agama, bahasa yang dipakai sehari-hari, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan kegiatan utama. Karakteristik afiliasi politik meliputi keanggotaan dalam partai politik, kedudukan dalam partai politik dan keanggotaan dalam ormas keagamaan.

### **3.1 Keterangan Demografi Responden**

Komposisi responden Pilkada menurut jenis kelamin relatif seimbang. Pada Pilkada gubernur, responden terdiri dari 48,4 persen laki-laki dan 51,6 persen perempuan. Pola komposisi yang sama ditemukan pada responden Pilkada bupati dan wali kota. Pada Pilkada bupati komposisi laki-laki 48,9 persen dan perempuan 51,1 persen. Demikian pula pada Pilkada wali kota komposisi responden terdiri dari 49,1 persen laki-laki dan 50,9 persen perempuan. Komposisi semacam ini sebanding dengan komposisi penduduk yang terdaftar berhak memilih pada pelaksanaan Pilkada, misalnya untuk Pilkada bupati di Kabupaten Tanah Datar komposisi penduduk yang berhak memilih adalah 46,9 persen laki-laki dan 53,1 persen perempuan.

Dilihat dari komposisi umur seperempat lebih responden berumur 50 tahun ke atas. Sebaliknya responden dari kelompok umur kurang dari 20 tahun, yang biasanya lebih banyak pemilih pemula, hanya sekitar sepersepuluh. Distribusi responden menurut kelompok umur disajikan pada Tabel 3.1. Terlihat pada tabel tersebut adanya pola yang sama, baik pada Pilkada gubernur, bupati dan wali kota bahwa semakin tua persentase responden semakin besar. Tabel 3.1 juga mengungkapkan bahwa responden berasal dari semua kelompok umur. Hal

tersebut berarti hasil studi ini merupakan pendapat atau informasi yang dihimpun dari masyarakat pada berbagai kelompok umur.

**Tabel 3.1: Persentase Responden menurut Karakteristik Demografi**

Karakteristik	Jenis Pilkada		
	Bupati	Wali kota	Gubernur
(1)	(2)	(3)	(4)
Jenis Kelamin			
Laki-laki	48,9	49,1	48,4
Perempuan	51,1	50,9	51,6
Total	100,0	100,0	100,0
Umur (tahun)			
< 20	10,2	10,5	10,9
20 – 29	15,3	22,7	19,5
30 – 39	19,2	21,3	21,1
40 – 49	42,4	21,5	22,5
50 +	31,5	24,0	26,1
Status Perkawinan			
Belum kawin	20,6	26,1	23,0
Kawin	69,6	65,5	68,2
Cerai hidup	1,3	3,3	2,2
Cerai mati	8,5	5,1	6,7
Pendatang ( <i>migran</i> )			
Seumur hidup	6,6	39,0	6,1
Risen	1,8	8,9	1,9

Lebih dari dua pertiga responden pada studi ini, baik pada Pilkada gubernur, bupati maupun wali kota, berstatus kawin. Hampir sekitar seperlima sampai seperempat responden berstatus belum kawin dan selebihnya adalah mereka yang berstatus cerai. Komposisi semacam ini dapat dipahami karena terkait erat dengan persyaratan responden yang mengharuskan seseorang yang telah mempunyai hak pilih dan peraturan perundangan tentang hak pilih<sup>8</sup>.

Pelaksanaan Pilkada memberikan arti penting bagi warga pendatang (*migran*). Pilkada memberikan peluang bagi warga pendatang untuk berpartisipasi dalam menentukan kepala daerah dengan persyaratan tertentu. Salah satu syarat pemilih adalah berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk<sup>9</sup>. Berdasarkan hitungan migrasi

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Bab IV, Pasal 15: Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Bab IV, Pasal 16 ayat (2) butir c.

risen<sup>10</sup>, studi ini mencakup 1,9 persen pendatang pada Pilkada gubernur, 1,8 persen pada Pilkada bupati dan 8,9 persen pada Pilkada wali kota. Pola serupa juga terjadi pada warga pendatang seumur hidup.

### **3.2 Latar Belakang Sosial dan Ekonomi Responden**

Latar belakang sosial dan ekonomi, disadari ataupun tidak, baik langsung maupun tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap sikap politik. Secara komunal pengaruh ini begitu terasa. Sejarah pergerakan perpolitikan Indonesia merekam hal tersebut, dari mulai masa pergerakan pra kemerdekaan, orde lama, orde baru sampai era reformasi. Setiap perubahan sistem perpolitikan bermula dari kesadaran adanya permasalahan ekonomi yang berimbas kepada permasalahan sosial. Gejala tersebut timbul sebagai akibat sistem perpolitikan yang dinilai tidak aspiratif terhadap kepentingan rakyat.

Sejarah juga menjadi saksi bahwa motor kesadaran setiap perubahan sistem perpolitikan selalu digerakkan dan digulirkan oleh mahasiswa<sup>11</sup>. Kelompok masyarakat yang satu ini pada umumnya memiliki latar belakang sosial (pendidikan) dan ekonomi yang lebih tinggi dari masyarakat kebanyakan. Menurut Lipset dalam Budiardjo, Miriam (1982) pendapatan (*income*), pendidikan dan status merupakan faktor penting dalam proses partisipasi.

Dilihat dari sosial budaya, studi ini mencakup suku bangsa Minang sebanyak 96,7 persen pada Pilkada gubernur, 98,5 persen pada Pilkada bupati dan 95,0 persen pada Pilkada wali kota. Selaras dengan suku bangsa, maka responden sebagian besar (lebih dari 90 persen) menggunakan Bahasa Minangkabau sebagai bahasa yang dipakai sehari-hari. Dilihat dari latar belakang agama, maka hampir semua responden (99 persen) pada setiap jenis Pilkada beragama Islam. Hal tersebut dapat dipahami karena agama mayoritas Minangkabau (Provinsi Sumatera Barat) adalah Islam yang terakumulasi dalam semboyan “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”.

---

<sup>10</sup> Tempat tinggal lima tahun yang lalu di luar wilayah studi (misalnya untuk Kota Solok yang dimaksud migrasi risen adalah semua penduduk Kota Solok yang lima tahun lalu bertempat tinggal di luar Kota Solok).

<sup>11</sup> Pemikiran politik modern Indonesia dimulai tahun 1900-an dan 1910-an dengan munculnya sekelompok kecil mahasiswa dan cendekiawan muda (Herbert Feith, 1982), Munculnya Angkatan 66 yang meruntuhkan kekuasaan Orde Lama dan Angkatan 98 yang menumbangkan kekuasaan Orde Baru.



**Tabel 3.2.**  
**Persentase Responden menurut Latar Belakang Sosial dan Ekonomi**

Karakteristik	Jenis Pilkada		
	Bupati	Wali kota	Gubernur
(1)	(2)	(3)	(4)
Suku Bangsa			
Minangkabau	98,5	95,0	96,7
Bukan Minangkabau	1,5	50,0	3,3
Total	100,0	100,0	100,0
Bahasa Sehari-hari			
Bahasa Indonesia	1,1	2,8	2,8
Bahasa Minangkabau	93,5	91,1	92,5
Bahasa Daerah lain	5,4	6,1	4,8
Total	100,0	100,0	100,0
Agama			
Islam	99,7	99,0	99,3
Protestan	0,1	0,6	0,3
Katolik	0,1	0,3	0,3
Hindu	-	-	-
Budha	-	0,1	0,1
Total	100,0	100,0	100,0
Pendidikan			
Tidak pernah sekolah/ Tidak tamat SD	9,0	9,2	8,3
SD	26,6	14,1	19,4
SLTP	23,6	15,9	20,0
SLTA	33,1	46,4	41,0
Diploma 1 s.d S3	7,7	14,4	11,3
Total	100,0	100,0	100,0
Kegiatan Utama			
Bekerja	51,9	51,2	51,5
Sekolah	6,1	7,9	7,9
Mengurus rumah tangga	29,7	28,0	28,0
Mencari pekerjaan	4,8	5,5	5,5
Lainnya	7,4	8,0	7,1
Total	100,0	100,0	100,0

Responden sebagian besar menamatkan pendidikan pada tingkat SLTA. Besarnya persentase untuk masing-masing jenis Pilkada beturut-turut adalah 33,1 persen Pilkada bupati, 46,4 persen Pilkada wali kota dan 11,3 persen Pilkada gubernur. Apabila memperhatikan Tabel 3.2 maka terlihat adanya pola yang sama pada pendidikan responden. Dari pendidikan rendah sampai SLTA persentase meningkat kemudian mulai menurun pada pendidikan Diploma 1 ke atas. Hal lain yang terlihat pada Tabel 3.2 adalah bahwa responden mewakili setiap jenjang pendidikan.

Dilihat dari kegiatan utama seminggu yang lalu sebagai cerminan aktifitas ekonomi, sekitar separoh dari responden, baik pada Pilkada bupati, wali kota

maupun gubernur, melakukan kegiatan bekerja, diikuti mengurus rumah tangga pada kisaran 28 persen. Tabel 3.2 menunjukkan bahwa responden juga berasal dari berbagai masyarakat yang dalam seminggu yang lalu melakukan kegiatan sekolah, mencari pekerjaan dan lainnya.

### **3.3 Latar Belakang Politik dan Organisasi Massa Keagamaan Responden**

Latar belakang politik yang dimaksudkan dalam bahasan ini adalah afiliasi responden terhadap keanggotaan partai politik. Afiliasi politik penduduk diklasifikasi menjadi tiga yaitu anggota, simpatisan dan bukan anggota/simpatisan partai politik. Keanggotaan dalam partai politik memang bukan satu-satunya bentuk partisipasi politik. Menurut Budiardjo, Miriam (1982) partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota salah satu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen dan sebagainya.

Dalam Pilkada meskipun bukan pemilihan partai politik, akan tetapi partai politik memegang peran penting dalam pencalonan pasangan kepala dan wakil kepala daerah<sup>12</sup>. Itu artinya partai politik merupakan sponsor utama dari pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. Aplikasi di masyarakat kesponsoran partai politik tidak membawa banyak arti bagi kesuksesan pasangan calon yang didukung tanpa dukungan penuh anggota partai.

Sebagian besar responden (lebih dari 91 persen) yang tercakup pada studi ini adalah masyarakat yang tidak terikat dengan suatu partai, artinya bukan anggota ataupun simpatisan partai politik. Dalam bahasa politik kelompok masyarakat ini dinamakan “pemilih mengambang” (*floating vote*)<sup>13</sup>. Proporsi responden menurut afiliasi politik disajikan pada Tabel 3.3. Dari tabel tersebut terlihat tingkatan masyarakat dalam hirarki partai politik. Sebagian besar adalah masyarakat yang tidak terikat dengan partai politik, kemudian diikuti simpatisan dan bagian terkecil masyarakat yang menjadi anggota partai politik. Fenomena

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005, Bab V, Pasal 6.

<sup>13</sup> Budiardjo, Miriam 1982, h. 23.

semacam ini merupakan fenomena umum dalam perpolitikan, seperti digambarkan dalam Gambar 3.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan yang biasanya tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, relatif lebih besar. Sebaliknya, jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik sangat kecil<sup>14</sup>.

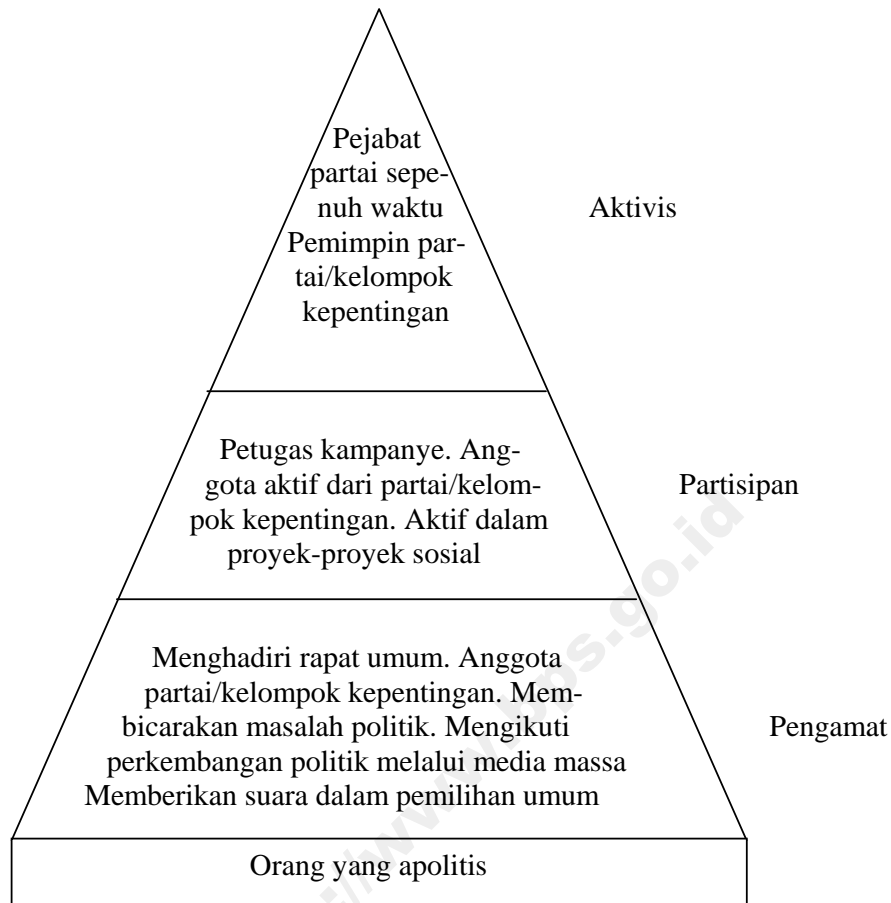
**Tabel 3.3.**  
**Persentase Responden menurut Afiliasi Partai Politik**

Karakteristik	Jenis Pilkada		
	Bupati	Wali kota	Gubernur
(1)	(2)	(3)	(4)
Keanggotaan			
Anggota	1,5	3,8	2,4
Simpatian	2,8	3,6	6,1
Bukan anggota/simpatian	95,7	92,6	91,5
Kedudukan dalam Keanggotaan Partai			
Pengurus	33,3	46,7	39,6
Anggota	66,7	53,3	60,4

Seperti halnya keanggotaan pada organisasi (partai) politik, hanya sebagian kecil responden yang terikat dalam keanggotaan organisasi massa (ormas) keagamaan. Responden anggota ormas keagamaan yang tercakup dalam studi ini tidak lebih dari enam persen, baik untuk Pilkada bupati (5,4 persen), wali kota (4,8 persen) maupun gubernur (6,3 persen). Meskipun responden berasal dari berbagai agama, akan tetapi mereka yang menjadi anggota ormas semua beragama Islam. Berdasarkan nama ormas, paling banyak berasal dari Muhammadiyah, diikuti Persatuan Islam dan Nahdatul Ulama. Kecuali untuk Pilkada wali kota persentase responden anggota Nahdatul Ulama lebih besar dari responden anggota Persatuan Islam. Tabel 3.4 menyajikan persentase responden menurut keanggotaan dalam ormas keagamaan.

<sup>14</sup> Budiardjo, Miriam 1982, h. 6.

**Gambar 3.1.**  
**Piramida Partisipasi Politik**



Sumber: David F. Roth dan Frank L. Wilson dalam Budiardjo, Miriam (1982)

**Tabel 3.4.**  
**Persentase Responden menurut Keanggotaan dalam Ormas Keagamaan**

Karakteristik	Jenis Pilkada		
	Bupati	Wali kota	Gubernur
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Keanggotaan</b>			
Anggota Ormas	5,4	4,8	6,3
Tidak Ikut Ormas	94,6	95,2	93,7
<b>Nama Ormas Keagamaan</b>			
Nahdatul Ulama	20,9	23,7	16,7
Muhammadiyah	53,5	28,9	40,5
Persatuan Islam	20,9	2,6	27,0
Ormas Lainnya	4,7	44,7	15,9

<http://www.bps.go.id>

Untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, KPUD menetapkan tahapan-tahapan dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tahapan yang dilakukan KPUD selaku penyelenggara Pilkada secara umum meliputi: tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Ketiga tahapan tersebut merupakan rangkaian yang saling terkait antara satu kegiatan dengan kegiatan berikutnya. Tahap persiapan menentukan kelancaran tahap pelaksanaan, dan tahap pelaksanaan akan berpengaruh terhadap tahap penyelesaian. Karena itu, partisipasi dan dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk suksesnya setiap tahapan, terutama pada tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Adapun tahap penyelesaian pada umumnya bersifat administratif KPUD seperti laporan KPU terkait dengan pelaksanaan pemilihan, pemantauan dan evaluasi, pertanggungjawaban anggaran dan pembubaran panitia pemilih.

Pada bahasan ini diulas peran serta masyarakat pada tahapan persiapan dan pelaksanaan yang dirinci menurut kegiatan sosialisasi dan pendaftaran pemilih, kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara. Selain membahas tentang peran serta masyarakat pada tahapan-tahapan tersebut, bab ini mengulas juga tentang kondisi keamanan selama proses pelaksanaan Pilkada. Kondisi keamanan memang bukan tahapan Pilkada, akan tetapi merupakan syarat mutlak yang harus kondusif agar Pilkada dapat terselenggara dengan aman, tertib, lancar dan demokratis.

#### **4.1. Tahap Sosialisasi dan Pendaftaran Pemilih**

Sosialisasi dan pendaftaran pemilih merupakan bagian dari tahap persiapan. Permulaan tahap persiapan bagi KPUD ditandai dengan adanya pemberitahuan DPRD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sejak pemberitahuan tersebut KPUD mulai merencanakan penyelenggaraan Pilkada, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan

pelaksanaan Pilkada; pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; dan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan diberikan waktu selama 14 hari sejak pemberitahuan DPRD.

Salah satu kegiatan penting, yang berimbas pada pengetahuan masyarakat tentang Pilkada, dari bagian tahap persiapan adalah sosialisasi Pilkada kepada masyarakat. Pilkada yang baru pertama kali diselenggarakan memerlukan upaya sosialisasi yang intensif agar terselenggara secara benar, baik dari segi teknis maupun semangat menghidupkan demokrasi pada tingkat daerah. Melalui sosialisasi yang dimaksudkan untuk mencerdaskan pemilih maka proses demokratisasi di daerah akan membuahkan hasil pemimpin yang berkualitas dan mendapat dukungan riil yang luas (Asri Harahap, 2005). Mengingat peran fungsi yang penting maka sosialisasi perlu mendapat perhatian serius dalam tahap kegiatan penyelenggaraan Pilkada. KPUD Kabupaten Tanah Datar mencantumkan kegiatan sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat pada pasal 2 ayat (6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2005.

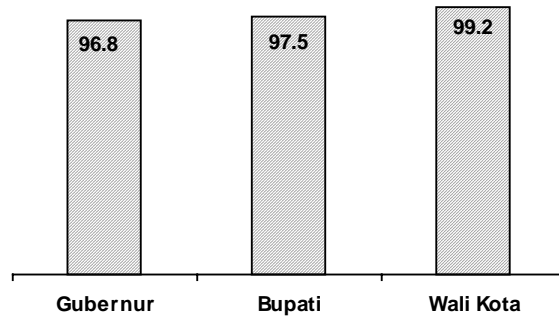
Hasil pendataan memperlihatkan respon masyarakat terhadap Pilkada cukup antusias. Hal tersebut tersirat dari besarnya persentase responden yang hampir semua mengetahui adanya Pilkada. Responden yang mengetahui Pilkada Gubernur mencapai 96,8 persen, pada Pilkada Bupati Tanah Datar mencapai 97,5 persen dan bahkan pada pemilihan Wali Kota Solok nyaris sempurna yaitu 99,2 persen (Gambar 4.1). Gambar 4.1 memperlihatkan besarnya persentase masyarakat yang mengetahui tentang Pilkada lebih besar pada Pilkada Kota Solok daripada Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Tanah Datar lebih besar daripada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat. Mengamati pola tersebut, tampaknya ada keterkaitan antara luas wilayah dengan cakupan masyarakat yang mengetahui pelaksanaan Pilkada. Bisa jadi hal tersebut terutama terkait langsung dengan keterbatasan dana dan waktu<sup>15</sup>. Artinya semakin luas wilayah yang harus dijangkau semakin memerlukan dana besar dan waktu lebih lama. Dengan kata lain keterbatasan dana dan waktu menyebabkan

---

<sup>15</sup> KPUD Kabupaten Tanah Datar menyediakan waktu untuk penyuluhan/pelatihan, sosialisasi dan rapat kerja dari tanggal 2 Mei s.d. 19 Agustus 2005 atau sekitar 3,5 bulan.

tidak semua wilayah terjangkau sosialisasi. Perlu diketahui Kota Solok terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 kecamatan dan Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 wilayah kabupaten/kota.

**Gambar 4.1 Persentase Responden yang Mengetahui Tentang Pelaksanaan Pilkada**



Menggali lebih jauh mengenai kapan mengetahui informasi tentang Pilkada, sebagian besar mengetahui sejak sebelum pendaftaran pemilih dan saat pendaftaran (pemutakhiran data) pemilih. Mengetahui sebelum pendaftaran identik dengan mengetahui Pilkada dari hasil sosialisasi. Besarnya proporsi pada kelompok ini menunjukkan masyarakat Kota Solok (65,5 persen) lebih banyak yang mengakses pelaksanaan sosialisasi daripada masyarakat Kabupaten Tanah Datar (32,0 persen). Sebaliknya di Kabupaten Tanah Datar tahapan pendaftaran (pemutakhiran data) menjadi salah satu alat efektif untuk sosialisasi. Hal ini terbukti responden yang mengetahui Pilkada sejak saat pendaftaran pemilih di Kabupaten Tanah datar mencapai 48,5 persen, hampir dua kali lebih besar dari Kota Solok yang hanya mencapai 27,9 persen. Tabel 4.1 menyajikan persentase responden menurut awal waktu mengetahui informasi Pilkada.

**Tabel 4.1. Persentase Responden menurut Waktu Pertama Kali Mengetahui Pilkada**

Waktu Mengetahui Pilkada	Pilkada		
	Gubernur	Bupati	Wali Kota
(1)	(2)	(3)	(4)
Sebelum pendaftaran pemilih	50.1	32.0	65.5
Saat pendaftaran pemilih	37.3	48.5	27.9
Sesudah pendaftaran pemilih	6.7	10.6	3.8
Saat pencoblosan	5.4	8.0	2.5
Setelah selesai pemilihan	0.5	0.9	0.3
Jumlah	100.0	100.0	100.0



Meskipun sosialisasi bukan keseluruhan tahapan dalam penyelenggaraan Pilkada, akan tetapi Tabel 4.1 menunjukkan bahwa semua tahapan Pilkada dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi bertujuan bukan hanya sekedar menyukseskan penyelenggaraan Pilkada melainkan yang utama menurut Asri Harahap (2005) adalah bagaimana masyarakat mampu bertindak secara rasional dan obyektif dalam memilih kepala daerah yang berkualitas. Dalam perspektif ini seharusnya semua pihak mengambil peran sosialisasi bukan hanya KPUD dan jajarannya. Dengan demikian setidaknya keterbatasan dana dan waktu dapat diatasi.

Berdasarkan sumber informasi, dari tiga jenis Pilkada terdapat kesamaan jenis sumber informasi yang banyak memberikan informasi kepada masyarakat diantaranya adalah spanduk/baliho; pamflet/brosur/leaflet; surat kabar, majalah dsb; televisi, radio, dan sebagainya. Jenis sumber informasi tersebut bahkan relatif lebih banyak menjangkau masyarakat dibanding kampanye, terutama televisi, radio, dsb dan pamflet/brosur/leaflet. Tabel 4.2 menyajikan persentase responden menurut sumber memperoleh informasi tentang Pilkada. Tabel tersebut memperlihatkan ada perbedaan pola sumber informasi antara Pilkada Gubernur dan Wali Kota Solok dengan Pilkada Kabupaten Tanah Datar. Pada Pilkada Gubernur dan Wali Kota Solok persentase sumber informasi terbesar terdapat pada televisi/radio diikuti pamflet/brosur/leaflet kemudian surat kabar/majalah dan spanduk/baliho. Sedangkan di Kabupaten Tanah Datar persentase terbesar terdapat pada pamflet/brosur diikuti spanduk/baliho kemudian televisi/radio dan surat kabar/majalah. Ini artinya penyebaran informasi lewat media masa, baik cetak maupun elektronik efektif untuk masyarakat di Kota Solok. Sementara di Kabupaten Tanah Datar penyebaran informasi lebih efektif melalui spanduk/baliho dan pamflet/brosur/leaflet. Perbedaan ini kemungkinan disebabkan terutama oleh akses terhadap media masa, wilayah Kota Solok (perkotaan) lebih mudah mengakses media masa dibanding Kabupaten Tanah Datar (perdesaan). Kemungkinan lain yang bisa menjelaskan perbedaan ini adalah faktor kultur masyarakat dan tingkat pendidikan.

Dari Tabel 4.2 tersebut, penyuluhan mempunyai pengaruh penyebaran informasi yang relatif paling kecil walaupun tidak jarang menelan biaya paling besar. Hal ini kiranya dapat dipahami karena keterbatasan peserta dalam

penyuluhan akibat keterbatasan dana, sarana dan waktu yang tersedia. Sehingga orang yang mengetahui informasi Pilkada dari penyuluhan terbatas, maksimum sebanyak undangan. Akibatnya persentase responden yang memperoleh informasi dari penyuluhan relatif lebih sedikit dibanding sumber informasi lain.

**Tabel 4.2. Persentase Responden menurut Sumber Mendapatkan Informasi Mengenai Pilkada**

Sumber Mendapatkan Informasi Pilkada	Pilkada		
	Gubernur	Bupati	Wali Kota
(1)	(2)	(3)	(4)
Penyuluhan	17.7	17.4	20.9
Spanduk/Baliho	60.1	59.1	64.2
Pamflet/brosur/leaflet	68.3	71.6	67.6
Surat kabar, majalah dsb	61.8	47.5	65.1
Televisi, radio, dsb	70.6	52.9	73.5
Kampanye	54.2	54.6	59.4
Lainnya	8.0	13.4	3.7

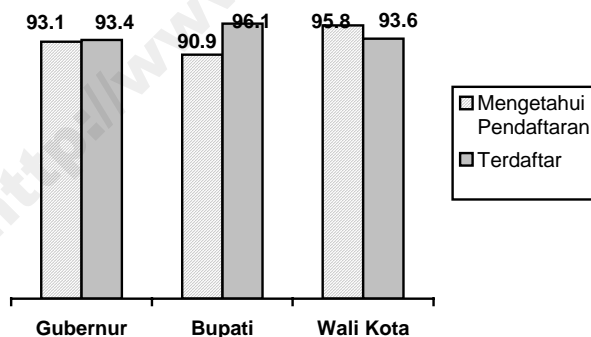
Spanduk/baliho yang kelihatannya hanya rentangan kain yang berisi tulisan/gambar terbukti lebih mempunyai daya penyampai informasi lebih efektif dibanding penyuluhan dan kampanye. Dari sisi biaya spanduk/baliho dapat dipastikan jauh lebih murah dari penyuluhan dan kampanye. Berdasarkan tempat pemasangan spanduk/baliho yang banyak diakses adalah yang terpasang di jalan raya/pasar/mal/terminal/stasiun/pelabuhan dan lingkungan pemukiman, seperti terlihat pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3. Persentase Responden yang Pernah Melihat Spanduk/Baliho Tentang Pilkada menurut Tempat Pemasangannya**

Tempat Pemasangan Spanduk/Baliho	Pilkada		
	Gubernur	Bupati	Wali Kota
(1)	(2)	(3)	(4)
Kantor gubernur/bupati/wali kota	9,2	7,2	8,5
Kantor kecamatan	21,9	23,5	18,5
Kantor desa/kelurahan	33,2	41,6	24,1
Perkantoran/kantor pemerintahan	21,2	14,6	20,5
Jalan raya/pasar/mal/terminal stasiun/pelabuhan	88,0	84,7	87,2
Lingkungan pemukiman	58,6	49,9	67,3
Lainnya	7,5	3,5	8,3

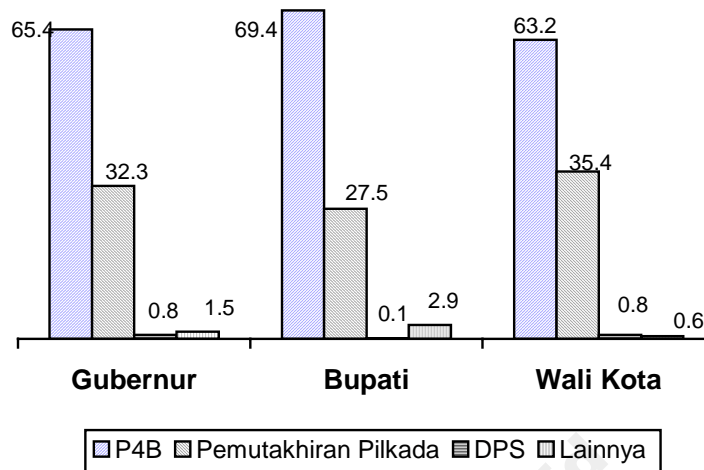
Selain sosialisasi kegiatan lain dalam tahapan persiapan yang melibatkan peran serta masyarakat adalah pendaftaran atau pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005. Tahapan ini sangat penting karena turut menentukan boleh tidaknya seorang warga menggunakan hak suara dalam pemilihan. Mengingat pentingnya kegiatan ini sewajarnya semua warga mengetahui waktu pendaftaran/pemutakhiran data pemilih. Namun kenyataan di masyarakat berbeda, meskipun persentase yang mengetahui cukup tinggi akan tetapi masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengetahui waktu pendaftaran. Hasil studi menunjukkan bahwa kisaran warga yang mengetahui adanya pendaftaran pemilih sekitar 90,9 persen (bupati), 93,1 persen (gubernur) dan tertinggi 95,8 persen (wali kota). Dari besaran proporsi itupun tidak semua yang mengetahui masa pendaftaran terdaftar sebagai pemilih. Gambar 4.2 menyajikan persentase responden yang mengetahui adanya pendaftaran pemilih dan besarnya proporsi dari mereka yang kemudian terdaftar sebagai pemilih.

**Gambar 4.2 Persentase Responden yang Mengetahui Masa Pendaftaran dan yang Teraftar Sebagai Pemilih**



Berdasarkan informasi dari responden yang terdaftar dalam Pilkada, terungkap bahwa kegiatan pemutakhiran (pendaftaran pemilih untuk Pilkada) data pemilih mampu menambah sekitar sepertiga jumlah pemilih. Penambahan pemilih setelah pengumuman Daftar Pemilih Sementara tidak sampai satu persen. Sedangkan sekitar dua per tiga selebihnya terdaftar ketika pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Gambar 4.3 menyajikan persentase responden menurut waktu didaftar sebagai pemilih.

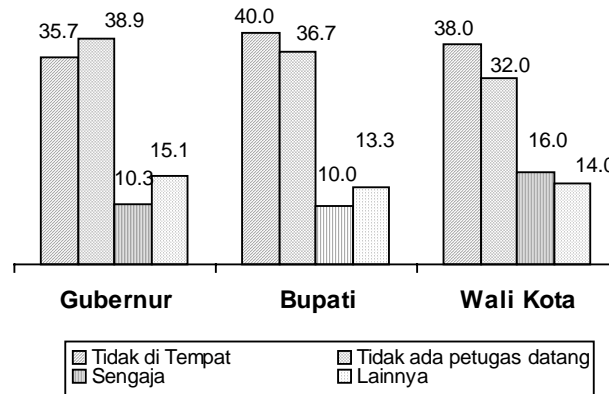
**Gambar 4.3. Persentase Responden Terdaftar Menurut Waktu Didaftar**



Kenyataan menunjukkan adanya responden yang mengetahui masa pendaftaran tetapi tidak terdaftar, meskipun jumlahnya relatif sedikit (Gambar 4.2), menarik untuk dikaji apa penyebabnya. Berdasarkan alasan yang diungkapkan, paling banyak beralasan ketika pendataan mereka sedang tidak ada di tempat, alasan kedua terbanyak disebabkan tidak ada petugas pendaftar yang datang, kemudian diikuti kesengajaan tidak mendaftar. Gambar 4.4 menyajikan besarnya persentase responden yang tidak terdaftar menurut alasan. Dari gambar tersebut terlihat pola yang hampir serupa, akan tetapi kalau mengamati lebih teliti maka terlihat perbedaan persentase pada alasan yang sengaja tidak terdaftar antara Pilkada Gubernur, Bupati dengan Wali Kota. Persentase yang sengaja tidak terdaftar lebih tinggi pada pemilihan Wali Kota Solok dibanding Bupati Tanah Datar dan Gubernur Sumatera Barat. Apabila orang yang sengaja tidak mendaftar ini dikategorikan sebagai golput<sup>16</sup> maka tingginya persentase di Kota Solok merupakan fenomena pemilu perkotaan dimana kecenderungan golput lebih tinggi. Menurut Budiardjo (1994) golput diperkirakan terutama tinggal di kota-kota besar.

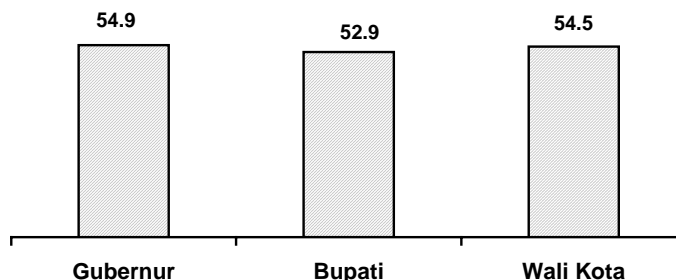
<sup>16</sup> Budiardjo (1994) mendefinisikan Golput sebagai orang yang dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihnya.

**Gambar 4.4. Persentase Responden yang Tidak Terdaftar Sebagai Pemilih Menurut Alasan dan Jenis Pemilihan**



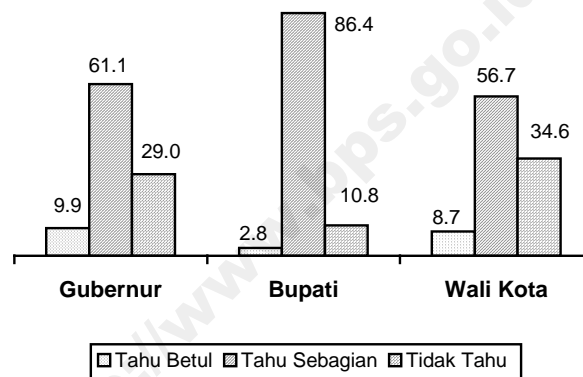
Salah satu misi sosialisasi adalah masyarakat mengenal siapa yang menjadi calon kepala daerah. Pengetahuan masyarakat tentang calon kepala daerah memungkinkan mereka membandingkan antara calon yang satu dengan calon lainnya. Meskipun waktu Pilkada baru berlalu sekitar 2-3 bulan, namun tidak banyak responden yang mampu mengingat jumlah pasangan calon dalam Pilkada. Hanya sekitar separuh lebih sedikit responden pada masing-masing jenis pemilihan yang mengetahui jumlah pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada (Gambar 4.5). Ada tiga kemungkinan mendiskusikan gejala ini, pertama responden telah begitu yakin dengan pilihannya sehingga tidak memperdulikan lagi calon lain. Kedua, efek dari partisipasi yang dikerahkan (*mobilized participation*) oleh partai pendukung salah satu pasangan calon sehingga mengabaikan pasangan calon lain. Ketiga, sikap masa bodoh sehingga Pilkada tidak membawa kesan apapun.

**Gambar 4.5. Persentase Responden yang Mengetahui Jumlah Pasangan Calon Kepala Daerah**



Terkait dengan partai politik pendukung pasangan calon, responden yang tahu betul partai-partai yang mendukung pasangan calon sangat sedikit sekali yaitu kurang dari 10 persen. Pada kasus ini di Kabupaten Tanah Datar bahkan hanya mencapai 2,8 persen. Gambar 4.6 menyajikan besarnya persentase responden yang mengetahui partai-partai yang mencalonkan pasangan calon kepala daerah. Memperhatikan gambar 4.6 semakin menunjukkan adanya kecenderungan apatis<sup>17</sup> lebih tinggi di masyarakat Kota Solok daripada Kabupaten Tanah Datar. Persentase responden yang tidak tahu partai-partai yang mendukung pasangan calon lebih tinggi di Kota Solok daripada Kabupaten Tanah Datar, yaitu 34,6 berbanding 10,8 persen.

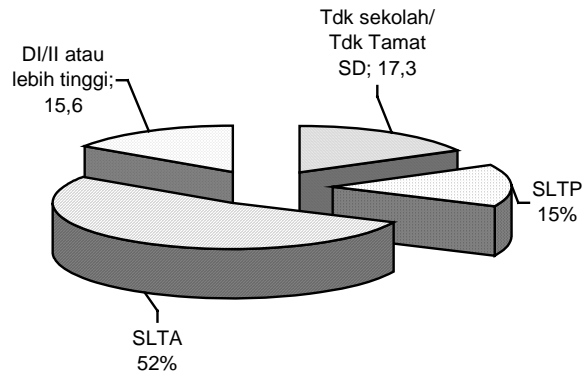
**Gambar 4.6 Persentase Responden Menurut Pengetahuan Partai-partai yang Mencalonkan Kepala Daerah**



Mc Closky (dalam Budiardjo, 1994) berpendapat bahwa sikap apatis karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham, masalah politik. Ada juga yang karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada yang karena kebetulan berada dalam lingkungan di mana ketidaksertaan merupakan hal yang terpuji. Dari kemungkinan yang disampaikan McClosky ada satu yang kurang tepat untuk kasus Kota Solok yaitu kurang paham masalah politik. Hal ini terungkap karena 68,1 persen responden yang tidak tahu partai-partai yang mendukung pasangan calon adalah mereka yang berpendidikan tamat SLTA atau lebih (Gambar 4.7). Sehingga kecil kemungkinan bagi orang yang berpendidikan SLTA ke atas kurang paham masalah politik.

<sup>17</sup> Apatis adalah kebalikan partisipasi yaitu masyarakat yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik (Budiardjo, 1994)

**Gambar 4.7. Persentase Responden yang Tidak Mengetahui Partai yang Mendukung Pasangan Calon Wali Kota Solok Menurut Pendidikan**



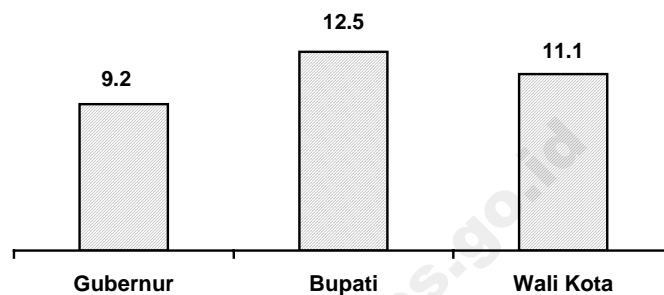
#### **4.2. Tahap Kampanye**

Seperti dijelaskan dalam pasal 1 ayat (12) Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005, kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan. Pelaksanaan kampanye dapat melalui pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, penyebaran melalui media cetak/elektronik, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, rapat umum, debat antar calon dan kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundangan. KPUD menyediakan waktu kampanye selama empat belas hari. Setiap pasangan calon mendapat hari khusus untuk menyelenggarakan kampanye, sehingga dapat menekan kemungkinan bentrok antar pendukung. Pengaturan jadwal dan penetapan bentuk kampanye dibicarakan bersama antara KPUD dengan team kampanye.

Kampanye sebagai sarana untuk menawarkan visi, misi dan program pasangan calon, seharusnya menarik minat masyarakat untuk mengikutinya. Akan tetapi dari hasil studi mengungkapkan sangat sedikit sekali masyarakat yang pernah menghadiri/mengikuti kampanye. Persentase mereka yang menghadiri kampanye hanya mencapai 9,2 persen untuk Pilkada Gubernur, 12,5 persen untuk Pilkada Bupati dan 11,1 persen untuk Pilkada Wali kota (Gambar 4.8). Meskipun partisipasi masyarakat dalam kampanye hanya sekitar sepersepuluh, hal ini bukan permasalahan serius karena pola semacam ini

merupakan gejala umum seperti diungkapkan Verba dan Nie (dalam Budiardjo, 1982). Verba dan Nie menemukan dari sejumlah orang Amerika yang diteliti hanya 11 persen orang yang termasuk dalam golongan "aktivis lengkap", yaitu golongan yang benar-benar aktivis dalam arti aktif melakukan segala macam kegiatan politik termasuk berkampanye, menjadi pimpinan partai sepenuh waktu dan sebagainya.

**Gambar 4.8. Persentase Responden yang Pernah Menghadiri/Mengikuti Kampanye**



Karakteristik dari sekitar sepersepuluh responden yang pernah menghadiri/mengikuti kampanye disajikan pada Tabel 4.4. Dari segi umur, separoh dari mereka telah berumur 40 tahun ke atas. Hal ini menandakan fenomena bahwa perpolitikan (Pilkada) di Sumatera Barat, Kabupaten Tanah Datar dan Kota Solok masih didominasi generasi yang berumur 40 tahun ke atas. Tidak menutup kemungkinan fenomena ini juga yang mewarnai perpolitikan nasional. Hal ini dapat dilihat dari usia para wakil rakyat yang duduk di DPRD maupun DPR. Karakteristik menurut tingkat pendidikan terlihat bahwa semakin tinggi pendidikan (dari tidak sekolah/belum tamat SD sampai dengan SLTA) semakin besar persentase. Sekitar separuh (kecuali di Kabupaten Tanah Datar hanya 41,1 persen) responden yang menghadiri/mengikuti kampanye berpendidikan SLTA atau lebih tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa pelaku aktivis politik (Pilkada) berasal dari kalangan dengan pendidikan serendah-rendahnya SLTA.



**Tabel 4.4. Persentase Responden yang Menghadiri Kampanye menurut Kelompok Umur dan Tingkat Pendidikan**

Karakteristik	Pilkada		
	Gubernur	Bupati	Wali kota
(1)	(2)	(3)	(4)
<u>Kelompok Umur (tahun)</u>	100.0	100.0	100.0
< 20	14.1	9.9	10.4
20 – 29	18.9	14.9	22.8
30 – 39	15.7	19.7	21.2
40 – 49	25.4	24.2	21.6
50 +	25.9	31.3	24.0
<u>Tingkat Pendidikan</u>	100.0	100.0	100.0
Tdk/belum pernah tamat SD	6.5	8.9	8.9
SD sederajat	15.7	26.3	14.2
SLTP sederajat	27.6	23.7	15.9
SLTA sederajat	38.4	33.3	46.4
Diploma I/II atau lebih tinggi	11.8	7.8	14.7

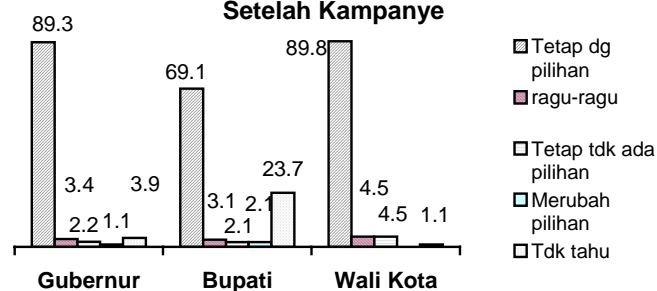
Ketentuan jenis kampanye telah diatur dalam PP no 6 Tahun 2005 termasuk di dalamnya menetapkan larangan-larangan dalam kampanye. Salah satu larangan misalnya larangan melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya (pasal 6 ayat (j) PP no 6 Tahun 2005). Padahal bentuk kampanye ini yang biasanya dimanfaatkan untuk memobilisasi pendukung. Dari sebagian kecil masyarakat yang mengikuti kampanye ternyata tidak semuanya aktif dalam setiap jenis kampanye. Jenis kampanye yang paling banyak diikuti oleh masyarakat adalah jenis tatap muka/dialog dan penyebaran bahan kampanye kepada umum (Tabel 4.5). Terdapat perbedaan pola pada jenis kampanye pemasangan alat peraga dan rapat umum antara Pilkada Bupati dan Pilkada Wali kota. Persentase Pilkada Bupati relatif lebih tinggi pada jenis kampanye pemasangan alat peraga (32,0 persen) dibanding rapat umum (21,6 persen). Sebaliknya pada Pilkada wali kota persentase rapat umum relatif lebih besar dibanding Pilkada wali kota, yaitu 35,2 persen berbanding 14,8 persen. Besar kemungkinan perbedaan pola ini disebabkan perbedaan kultur antara masyarakat wilayah Kabupaten (perdesaan) dengan wilayah kota (perkotaan).

**Tabel 4.5. Persentase Responden yang Menghadiri Kampanye menurut Jenis Kampanye yang Diikuti**

Jenis Kampanye	Pilkada		
	Gubernur	Bupati	Wali kota
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertemuan terbatas	14.0	16.5	10.2
Tatap muka dan dialog	35.4	50.5	46.6
Penyebaran/penyiaran melalui media cetak/ elektronik	24.7	19.6	14.8
Penyebaran bahan kampanye kepada umum	41.6	50.5	25.0
Pemasangan alat peraga	23.6	32.0	14.8
Rapat umum	32.0	21.6	35.2
Debat antar calon	7.9	8.2	13.6
Lainnya	7.9	3.1	10.2

Kampanye yang sedianya bertujuan untuk menambah pendukung melalui penyampaian visi, misi dan program pasangan calon pada prakteknya hanya berfungsi sebagai sarana untuk meyakinkan para pemilih. Hal ini terbukti dari sikap yang menghadiri kampanye. Sebagian besar mereka yang mengikuti kampanye menyatakan tetap dengan pilihan seperti disajikan pada Gambar 4.9. Dari gambar tersebut terlihat untuk kampanye Pilkada Bupati Tanah Datar bahkan tidak mampu memikat masyarakat yang belum tahu sikap pilihannya, padahal di antara masyarakat yang menghadiri kampanye yang termasuk kelompok ini relatif besar yaitu 23,7 persen. Sehingga kemungkinan sebagian besar peserta kampanye adalah hanya pendukung utama dari pasangan calon. Apabila memang demikian maka kampanye lebih menyerupai upaya konsolidasi internal pendukung calon, bukan sebagai sarana menambah pendukung.

**Gambar 4.9. Persentase Responden yang Menghadiri Kampanye menurut Sikap Setelah Kampanye**



### **4.3. Pencoblosan dan Penghitungan Suara**

Setelah masa pendaftaran dan kampanye usai, tibalah saatnya bagi masyarakat untuk memberikan suaranya, memilih pemimpin mereka selama lima tahun ke depan. Tahapan yang dikenal dengan istilah pencoblosan dan penghitungan suara ini, selanjutnya akan diulas dalam tulisan berikut. Di antara isu yang akan diangkat dalam bagian ini adalah tingkat partisipasi pemilih, alasan tidak mengikuti pemilihan, serta alasan pemilihan kepala daerah yang dipilah menurut tingkat pendidikan masyarakat.

#### **4.3.1. Pilkada Gubernur**

Berdasarkan data KPUD Sumatera Barat, jumlah pemilih yang terdaftar ada sebanyak 2.927.904 orang. Dari jumlah mereka yang terdaftar, hanya 64,3 persen yang menggunakan hak pilihnya. Tingkat partisipasi ini tergolong rendah, dengan kata lain jumlah mereka yang terdaftar tapi tidak memilih (golput) cukup besar. Apalagi bila dibandingkan dengan jumlah suara yang diraih oleh pemenang pemilihan, jumlah golput jauh lebih besar. Pasangan pemenang Pilkada Gubernur Sumatera Barat yaitu Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman, tercatat memperoleh 41,5 persen dari total suara sah yang masuk atau sebanyak 757.269 suara. Sementara jumlah golput 1.071.161 orang.

Fenomena besarnya golput di Sumatera Barat ini tampaknya sejalan dengan fenomena di daerah-daerah lain. Di Kutai Kartanegara tercatat angka golput sebesar 29,3 persen, sementara di Blitar sebanyak 44 persen. Fakta ini rupanya berlawanan dengan penilaian birokrat pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, yang sebelumnya optimis bahwa golput pada Pilkada akan rendah. Sistem memilih kepala daerah secara langsung ini sangat ditunggu masyarakat sehingga menjadi dorongan kuat bagi mereka untuk menyukseskan sehingga diyakini golput akan sangat kecil, bahkan nol persen. Demikian, kutipan keterangan dari Kepala Pusat Penerangan Depdagri Ujang Sudirman menjelang pelaksanaan Pilkada pertama di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (*Kompas*, 15 Desember 2005)

Sebagai ukuran ideal sebuah pesta demokrasi, angka partisipasi pemilih yang tinggi tetap menjadi nilai penting kualitas demokrasi. Karenanya wajar bila Ketua DPRD Sumatera Barat, Masful, menilai Pilkada di Sumatera Barat telah

berjalan sukses namun belum berkualitas. DPRD pun membentuk pansus untuk mengevaluasi Pilkada 27 Juni itu. Pansus akan menelusuri seberapa banyak orang tidak memilih karena kesalahan teknis di lapangan (*Republika*, 15 Juli 2005).

Tentu banyak alasan mengapa seseorang tidak menggunakan hak pilihnya. Beberapa alasan tersebut berhasil diungkapkan oleh hasil survei ini. Mereka yang terdaftar tetapi tidak menggunakan hak pilihnya Di antaranya beralasan sedang bepergian/dinas (26,5 persen), tidak ada calon yang sesuai (14,7 persen), tidak ada calon yang dikenal (8,8 persen), dan alasan lain-lain yang mencakup sakit, malas, pindah tempat tinggal, tidak punya kartu pemilih, sibuk, dan apatis terhadap calon (38,2 persen).

Bagi masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, menarik untuk dilihat apakah tingkat pendidikan mempengaruhi alasan pemilihan calon kepala daerah. Tabel 4.6 di bawah ini menyajikan data responden menurut pendidikan dan alasan memilih pasangan calon gubernur-wakil gubernur.

**Tabel 4.6. Persentase Responden menurut Pendidikan dan Alasan Memilih Calon Gubernur/Wakil Gubernur**

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tertarik Program	Figur Calon	Putera Daerah	Agama yang sama	Parpol yang sama	Lain-nya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tidak tamat SD	35,5	25,5	12,8	8,5	2,8	14,9	100
SD	34,7	31,5	12,9	7,6	2,4	10,9	100
SLTP	47,3	29,1	10,6	3,0	2,1	7,9	100
SLTA	48,9	34,7	7,6	1,4	1,8	5,6	100
Perguruan Tinggi	61,6	24,6	2,4	2,8	3,3	5,2	100
Total	46,3	31,1	11,8	5,0	2,8	3,0	100

Terlihat bahwa pada semua jenjang pendidikan, persentase responden yang memilih kepala daerah karena tertarik dengan program adalah persentase terbesar. Secara umum, semakin tinggi jenjang pendidikan, terlihat semakin besar persentase respondennya. Persentase terbesar kedua adalah persentase

mereka yang memilih karena figur calon gubernur/wakil gubernur. Selanjutnya, mereka yang memilih dengan alasan putra daerah merupakan persentase terbesar ketiga. Hal ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan, kecuali pada responden yang tidak tamat SD, persentase memilih dengan alasan lainnya menempati urutan ketiga.

#### **4.3.2. Pilkada Wali Kota Solok**

Jumlah memilih yang terdaftar di Kota Solok tercatat sejumlah 37 427 orang. Dari jumlah tersebut, 23 420 orang atau 62,6 persen menggunakan hak pilihnya. Tingkat partisipasi ini lebih rendah dibandingkan dengan tingkat partisipasi pada Pilkada Gubernur yang sebesar 64,3 persen.

Pilkada Kota Solok dilaksanakan bersamaan dengan Pilkada Gubernur yaitu pada tanggal 27 Juni 2005. Pemenang Pilkada Kota Solok adalah pasangan Syamsu Rahim dan Irzal Ilyas. Pasangan ini berhasil meraih 8 325 suara atau 37,8 persen dari total suara yang sah. Sama halnya dengan Pilkada Gubernur, jumlah suara yang berhasil diraih pemenang jauh lebih sedikit dari jumlah golput yang sebanyak 14 007 orang.

Besar ataupun kecil persentase golput memang tidak mengganggu keabsahan Pilkada. Pilkada tetap dinyatakan sah secara hukum. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tidak mensyaratkan bahwa pengesahan hasil pemilihan harus mempertimbangkan persentase jumlah memilih yang menggunakan haknya. Aturan yang ada hanya mengenai penentuan pemenang berdasarkan persentase jumlah suara yang diperoleh terhadap total jumlah memilih. Namun demikian, seperti disebutkan sebelumnya, besarnya angka golput tentunya mengurangi kualitas suatu pesta demokrasi.

Hasil survei menunjukkan mereka yang terdaftar tetapi tidak menggunakan hak pilihnya antara lain beralasan karena sakit, pindah tempat tinggal, tidak punya kartu, apatis terhadap calon, dan lain-lain (33,3 persen), sedang bepergian/dinas (25 persen), tidak ada calon yang sesuai (20,8 persen), tidak ada calon yang dikenal (8,3 persen) dan tidak sempat (4,2 persen).

Masyarakat yang menggunakan hak pilih mempunyai berbagai alasan dalam memilih kepala daerahnya. Hasil survei ini berhasil mengungkapkan beberapa alasan tersebut. Pada Tabel 4.7 berikut disajikan persentase responden

menurut pendidikan yang ditamatkan dan alasan pemilihan wali kota/wakil wali kota.

**Tabel 4.7. Persentase Responden menurut Pendidikan dan Alasan Memilih Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Solok**

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Tertarik program	Figur calon	Putra daerah	Agama yang sama	Parpol yang sama	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tidak tamat SD	39,7	6,3	20,6	17,5	1,6	14,3	100
SD	47,5	8,9	11,9	12,9	5,0	13,8	100
SLTP	66,4	9,7	7,1	6,2	4,4	6,2	100
SLTA	74,6	9,2	5,2	3,2	2,9	4,9	100
Perguruan Tinggi	77,1	6,4	0,9	4,6	1,8	9,2	100
Total	66,9	8,6	7,1	6,4	3,3	7,7	100

Seperti pada Pilkada Gubernur, persentase responden yang memilih karena tertarik dengan program adalah persentase terbesar (66,9 persen). Hal ini berlaku pada semua jenjang pendidikan, bahkan angkanya semakin membesar seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan yang ditamatkan responden. Namun, untuk alasan karena figur calon, yang pada Pilkada Gubernur angkanya 31,1 persen, pada Pilkada Wali Kota Solok hanya sekitar 8,6 persen. Angka yang jauh berbeda, walaupun sama-sama menempati alasan kedua yang paling banyak dipilih responden.

#### **4.3.2. Pilkada Bupati Tanah Datar**

Pilkada di Tanah Datar dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2005. Menurut data KPUD Tanah Datar terdapat 218.667 pemilih yang terdaftar. Di antara mereka sebanyak 143.939 orang atau sekitar 65,8 persen menggunakan hak pilih. Sementara sebanyak 74.728 orang atau 34,2 persen tidak menggunakan hak pilih (golput).

Angka golput Pilkada Bupati Tanah Datar ini tergolong besar dan bahkan melebihi jumlah suara yang diraih pasangan pemenang, Shadiq Pasadique dan Aulizul Syuib, yaitu sebanyak 72.774 suara atau 51,1 persen dari total suara yang

sah. Kondisi ini sama halnya dengan kondisi pada Pilkada Gubernur dan Pilkada Wali Kota Solok.

Rupanya pemilihan kepala daerah secara langsung tidak sepenuhnya menyedot perhatian pemilih. Padahal, proses demokrasi ini baru pertama kali dilaksanakan setelah sebelumnya selama tiga puluh tahun lebih rakyat tidak memiliki kedaulatan untuk memilih pemimpin mereka. Bagaimanapun, Pilkada sekarang ini barulah permulaan dari proses belajar berdemokrasi secara langsung dalam memilih kepala daerah, sehingga masih terbuka ruang untuk melakukan berbagai perbaikan baik menyangkut infrastruktur hukumnya hingga pelaksanaan di lapangan.

Banyak alasan mengapa rakyat tidak menggunakan hak pilihnya. Berikut beberapa alasan dari hasil survei di Kabupaten Tanah Datar. Mereka yang terdaftar tetapi tidak menggunakan hak pilihnya Di antaranya beralasan tidak ada calon yang sesuai (20,7 persen), sedang bepergian/dinas (20,7 persen), tidak sempat (3,4 persen), dan alasan lain-lain yang mencakup sakit, sibuk, tidak punya kartu, pindah tempat tinggal, malas, dan apatis terhadap calon (48,3 persen).

Sementara mereka yang menggunakan hak pilihnya juga mempunyai alasan dalam memilih calon pemimpinnya. Tabel 4.8 berikut menyajikan persentase responden menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan dan alasan pemilihan salah satu pasangan calon bupati/wakil bupati.

**Tabel 4.8. Persentase Responden menurut Pendidikan dan Alasan Memilih Calon Bupati/Wakil Bupati Tanah Datar**

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Tertarik program	Figur calon	Putra daerah	Agama yang sama	Parpol yang sama	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tidak tamat SD	43,8	15,6	20,3	3,1	4,7	12,5	100
SD	32,0	26,8	21,6	7,2	2,1	10,3	100
SLTP	49,7	17,2	17,8	4,3	2,5	8,5	100
SLTA	55,6	21,0	13,2	0,8	0,8	8,6	100
Perguruan Tinggi	67,9	12,5	5,4	1,8	5,4	7,1	100
Total	47,8	20,6	16,5	3,6	2,2	9,3	100

Pada semua jenjang pendidikan, persentase responden yang memilih kepala daerah karena tertarik dengan program merupakan persentase terbesar dengan kisaran antara 32 persen hingga 67,9 persen. Sementara, secara keseluruhan persentase terbesar kedua adalah persentase mereka yang memilih karena figur calon bupati/wakil bupati (20,6 persen). Selanjutnya, mereka yang memilih dengan alasan putra daerah merupakan persentase terbesar ketiga (16,5 persen).

#### **4.4. Kondisi Keamanan Selama Pilkada**

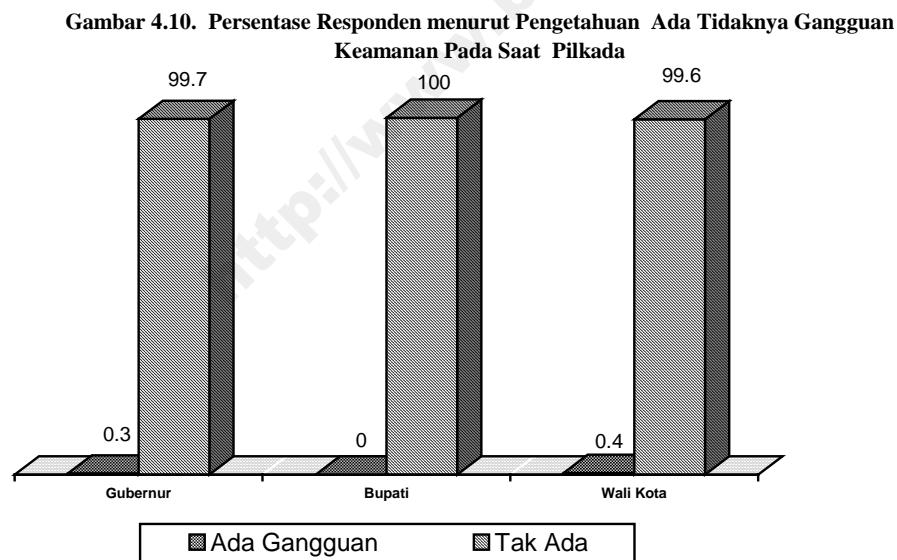
Konflik adalah penyebab utama terjadinya gangguan keamanan. Konflik biasanya terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antar satu sama lain baik secara individu maupun golongan. Menurut sifatnya, konflik bisa dibedakan menjadi dua macam yaitu konflik vertikal dan konflik horisontal, walaupun sesungguhnya sulit membedakan antara kedua jenis konflik tersebut karena akhirnya mengarah ke vertikal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi akibat adanya pertentangan antara golongan penguasa dengan yang dikuasai, atau antara kelas tinggi dan kelas rendah. Penguasa atau golongan yang berada di kelas tinggi mempertahankan kedudukannya dan sebaliknya golongan yang dikuasai atau yang berada di kelas rendah berusaha merebut atau mengambil alih kekuasaan atau menggantikan di posisi kelas tinggi. Sedangkan konflik horisontal adalah konflik yang terjadi karena adanya perbedaan teritorial, suku bangsa, agama, dan ideologi.

Ada tujuh variabel dalam studi ini yang bisa dijadikan sebagai indikator penyebab terjadinya konflik yaitu: suku bangsa, agama, ormas yang berazaskan agama, pendidikan, kegiatan bekerja, migran, dan keanggotaan partai politik. Pada bab terdahulu telah diuraikan bahwa suku bangsa dan agama responden sangat homogen yaitu hampir 100 persen suku Minang dan beragama Islam. Tingkat pendidikan responden cukup baik yaitu sekitar 70 persen responden minimal telah menamatkan pendidikan dasar 9 tahun atau sekitar 90 persen berpendidikan minimal SD. Status ekonomi juga relatif bagus, hal ini ditandai dengan besarnya angka pengangguran (mencari pekerjaan) responden yang sekitar 5 persen. Besarnya angka keikutsertaan anggota partai atau ormas mengindikasikan potensi terjadinya konflik sangat kecil. Berdasarkan data yang dikumpulkan, sekitar 95 persen responden tidak menjadi anggota ormas dan



lebih dari 91 persen responden tidak menjadi anggota partai. Tingkat migrasi yang mengindikasikan adanya perbedaan teritorial cukup bervariasi antar jenis Pilkada. Migran risen untuk responden Pilkada bupati dan gubernur masing-masing tidak sampai 2 persen, sedang untuk Pilkada wali kota sebesar 8,9 persen. Migran seumur hidup sedikit lebih tinggi untuk Pilkada bupati dan Pilkada gubernur yaitu sekitar 6 persen sedang untuk Pilkada wali kota cukup tinggi yaitu 39 persen. Walaupun cukup tinggi namun jika dilihat dari suku bangsa yang sangat homogen, maka migran tersebut bisa dipastikan masih berasal dari Ranah Minang.

Dari data yang dikumpulkan untuk tujuh indikator yang kemungkinan menjadi penyebab konflik, tak satupun yang menunjukkan adanya potensi penyebab konflik, yang berarti tidak ada tanda-tanda penyebab terjadinya gangguan keamanan. Berdasarkan wawancara dengan responden memang tidak tampak adanya gangguan keamanan pada Pilkada Gubernur, Bupati maupun Wali Kota. Hal ini ditunjukkan dengan persentase pengetahuan responden tentang adanya gangguan keamanan saat Pilkada yang sangat kecil (Gambar 4.10).



Di samping faktor dasar pemicu terjadinya gangguan keamanan yang tidak potensial, suasana aman dalam Pilkada di Propinsi Sumatera Barat juga didukung oleh budaya musyawarah dan mufakat yang turun-temurun. Di Kabupaten Tanah Datar misalnya, daerah yang dalam penelitian tidak ditemukan satu responden pun yang mengetahui adanya gangguan keamanan, budaya

demokrasi merupakan warisan turun-temurun yang sudah tertanam sejak lama. Hal ini dapat dilihat dari lambang daerah yang terdapat gambar balai adat, yang melambangkan tempat bermufakat, tempat melahirkan falsafah dan pikiran khas masyarakat Tanah Datar yang terkenal dengan sistem demokrasi menurut alur dan patut sebagai lambang konsekuensi melaksanakan demokrasi.

Sejalan dengan faktor adat, menurut Ketua dan Koordinator Divisi Teknis KPU Kabupaten Tanah Datar, kunci keberhasilan Pilkada di Kabupaten Tanah Datar kemungkinan disebabkan oleh:

- a. Adanya komunikasi yang baik antara KPU dengan pemain (calon dan tim sukses);
- b. Tim kampanye profesional sehingga mampu menggaet massa, bukan memprovokasi;
- c. Unsur pelaksana (PPS dan KPPS) sudah berpengalaman dari Pemilu sebelumnya;
- d. Pemahaman berdemokrasi masyarakat Kabupaten Tanah Datar sudah tinggi;
- e. Semangat kekeluargaan cukup tinggi yang dikenal dengan istilah "*Badun Sanak*" yaitu Pemilu kekeluargaan.

Di lain pihak, Panwas menilai bahwa keberhasilan Pilkada di Kabupaten Tanah Datar disebabkan oleh:

1. Rakyat terbiasa melaksanakan pemilihan langsung yaitu ketika memilih wali nagari.
2. Sebelum kampanye dimulai, diadakan apel di Polres untuk membacakan dan menandatangani ikrar para pasangan calon untuk mengadakan Pemilu kekeluargaan di hadapan masyarakat.

Sementara itu salah satu tokoh tim sukses kandidat yang memperoleh suara terbanyak mengatakan bahwa salah satu kunci aman dalam Pilkada Kabupaten Tanah Datar adalah adanya kesadaran demokrasi yang tinggi. Sikap ini tercermin ketika telah diperoleh hasil perhitungan suara, malam harinya team sukses bersama pasangan calon mengadakan pertemuan dengan para pendukung untuk menanamkan rasa demokrasi (mengakui kekalahan). Para pendukung diberi pengertian dan disadarkan bahwa demokrasi itu ada yang menang dan ada

yang kalah, serta tidak mempersoalkan siapapun yang menang. Siapapun yang menang harus didukung.

<http://www.bps.go.id>

Sumatera Barat telah selesai menyelenggarakan pemilihan gubernur dan beberapa bupati/wali kota. Tidak ada hambatan yang berarti dalam pemilihan kepala daerah di ranah minang ini. Terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur adalah Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman. Sementara dua daerah tingkat II yang menjadi daerah survei yaitu Kota Solok Dan Kabupaten Tanah Datar, juga telah berhasil menyelesaikan pemilihan kepala daerahnya. Untuk Wali kota dan Wakil Wali kota Solok terpilih pasangan Syamsu Rahim dan Irzal Ilyas, sedangkan untuk Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Datar terpilih Shadiq Pasadique dan Aulizul Syuib.

Setelah selesai pemilihan, menarik untuk dicermati bagaimana sikap dan harapan masyarakat terhadap Gubernur, Bupati dan Wali kota terpilih. Sedangkan menyangkut sikap, menarik untuk diketahui bagaimana pemilih bersikap jika kepala daerah terpilih ternyata tidak sesuai dengan pilihannya. Selanjutnya, kepada kepala daerah terpilih, masyarakat tentunya menaruh berbagai harapan. Sikap dan harapan masyarakat tersebut secara lebih rinci akan diuraikan pada bagian berikut.

### **5.1. Sikap dan Harapan Masyarakat terhadap Gubernur Terpilih**

Dari 1994 responden yang diwawancarai, 92,7 persen diantaranya mengaku menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Di antara mereka, sebanyak 86,8 persen menyatakan bahwa pasangan gubernur dan wakil gubernur pemenang Pilkada adalah pilihan mereka. Sementara dari data pemilih keseluruhan yang tercatat di KPUD Sumatera Barat, tingkat partisipasi pemilih adalah 64,3 persen. Dari jumlah suara sah yang masuk, persentase pemilih pasangan Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman adalah sekitar 41,5 persen. Besarnya persentase masyarakat yang memilih pasangan ini menunjukkan dukungan yang kuat terhadap pasangan ini.

Mengapa masyarakat memilih Gamawan dan Marlis sebagai gubernur dan wakil gubernur? Hasil survei berikut mengungkapkan alasan pemilihan pasangan ini. Sebanyak 46,7 persen responden menjawab memilih Gamawan dan Marlis karena tertarik dengan program yang ditawarkan, 30,6 persen memilih

karena figur calon gubernur/wakil gubernur, 8,9 persen memilih pasangan tersebut dengan alasan mereka adalah putra daerah, selebihnya memilih karena dari parpol yang sama, suku bangsa yang sama dan lain-lain.

Dua alasan utama dalam memilih yaitu alasan ketertarikan terhadap program dan alasan karena figur kandidat akan diurai lebih lanjut. Terkait alasan memilih calon gubernur/wakil gubernur karena tertarik dengan program yang ditawarkan, adalah cukup mengejutkan bahwa kelima pasang calon gubernur dan wakil gubernur ternyata menawarkan visi dan misi yang hampir sama (*detikcom*, 10 Juni 2005). Lima pasangan itu adalah, Leonardy Harmainy-Rusdi Lubis (Partai Golkar), Kapitra Ampera-Dalimi Abdullah (PPP dan Partai Demokrat), Gamawan Fauzi-Marlis Rahman (PDIP dan PBB), Irwan Prayitno-Ikasuma Hamid (PKS) dan Jeffrie Geovanie-Dasman Lanin (Koalisi Sakato).

Di bidang ekonomi misalnya, masing-masing mengklaim memiliki kemampuan menarik investor baik lokal maupun asing untuk berinvestasi di Sumatera Barat bila mereka terpilih sebagai pemenang. Di bidang pendidikan, masing-masing ingin membangkitkan kembali sumber daya manusia dan mengangkat kualitas pendidikan. Yang agak berbeda adalah kampanye Gamawan dan Irwan Prayitno di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Gamawan berjanji akan terus berupaya memerangi korupsi yang selama ini menjadi momok di Sumbar, sementara Irwan berjanji akan memerangi korupsi dengan memulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan yang lebih luas.

Mengingat relatif samanya program yang ditawarkan, alasan pemilihan karena figur tampaknya merupakan penentu kemenangan. Seperti yang ditulis *Harian Republika*, Gamawan menang lebih karena pesona diri. Beliau sebelumnya sukses menjabat sebagai Bupati Solok selama dua periode berturut-turut. Lagipula nama Gamawan cukup terkenal di Sumatera Barat. Gamawan adalah bupati pertama yang menyelesaikan program “kembali ke nagari” yaitu menukar nama pemerintahan terendah dari “desa” menjadi “nagari” seperti sebelum tahun 1980-an. Ia juga bupati yang pernah hilang di hutan, sehingga membuat gempar Sumatera Barat. Ia adalah bupati yang 'keras kepala' sehingga mau berhadap-hadapan dengan gubernur kalau gubernur ia nilai salah (*Republika*, 11 Juli 2005). Gamawan juga mempermudah birokrasi untuk perizinan, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan pemberian tunjangan daerah.

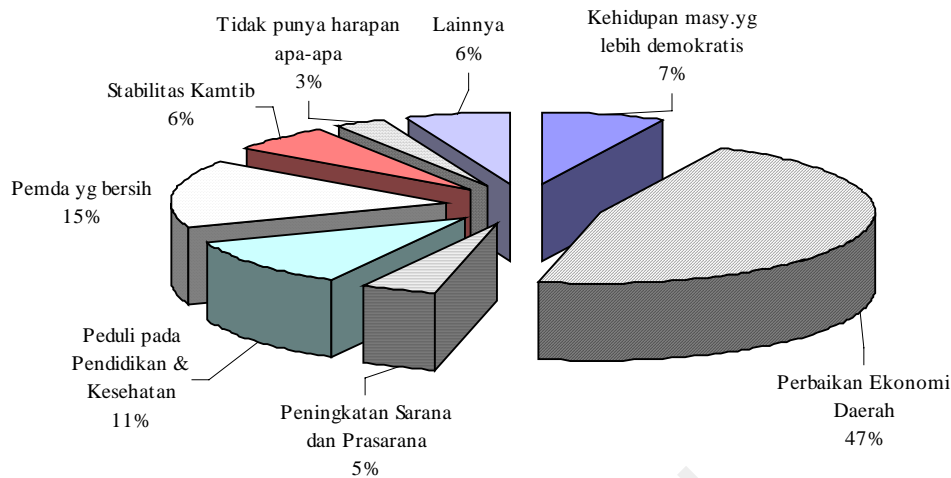
Di bulan September 2004, Gamawan memperoleh penghargaan Bung Hatta Award atas upayanya memberantas korupsi dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bersih. Penghargaan untuk Gamawan bertambah dengan diperolehnya Pilar Award 2005. Penghargaan ini diberikan kepada mereka yang dinilai berprestasi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan suap di Indonesia.

Gamawan menggandeng Marlis Rahman dalam Pilkada. Marlis Rahman adalah dosen Universitas Andalas yang juga mantan ketua Forum Rektor Indonesia. Majunya pasangan tokoh antikorupsi dan tokoh kritis dari perguruan tinggi itu mendapat sambutan hangat dari berbagai elemen masyarakat. Dukungan demi dukungan terus berdatangan dari organisasi sosial kemasyarakatan, baik formal maupun nonformal. Bahkan sebelum pemilihan dilakukan, banyak yang memprediksi bahwa pasangan yang disingkat GAMMA (Gamawan-Marlis) ini akan memperoleh suara mayoritas. Perkiraan itu ternyata tidak meleset (*Pontianak Post*, 3 Juli 2005).

Sebanyak 13,2 persen responden yang tidak memilih Gamawan dan Marlis, sebagian besar dapat menerima dengan baik kemenangan Gamawan (80,5 persen), sementara sebanyak 17,5 persen menyatakan menerima walau dengan terpaksa, dan hanya sebagian kecil yang tidak dapat menerima (1,6 persen).

Mayoritas responden (91,5 persen) optimis gubernur dan wakil gubernur terpilih dapat memajukan Sumatera Barat. Mengenai harapan utama masyarakat terhadap Gamawan dan Marlis, berikut disajikan hasil survei pada Gambar 5.1 berikut. Sekitar 47 persen responden berharap Gamawan dan Marlis dapat memperbaiki perekonomian daerah (lihat Gambar 5.1). Sementara sebanyak 15,2 persen berharap terbentuknya pemerintahan daerah yang bersih, dan 11,3 persen berharap terbentuknya pemerintahan daerah yang peduli pada pendidikan dan kesehatan.

**Gambar 5.1: Persentase Responden menurut Prioritas Harapan terhadap Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih**



## 5.2. Sikap dan Harapan Masyarakat terhadap Bupati/Wali Kota Terpilih

### Kota Solok

Sebanyak 62,6 persen pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kota Solok. Keluar sebagai pemenang adalah pasangan Syamsu Rahim dan Irzal Ilyas. Pasangan ini berhasil memperoleh 37,8 persen dari jumlah suara sah. Sementara hasil survei ini menunjukkan, dari 797 responden yang berhasil diwawancarai, 91,8 persen diantaranya mengaku menggunakan hak pilih. Di antara mereka yang ikut Pilkada ini, 78 persen mengaku memilih pasangan Syamsu Rahim dan Irzal Ilyas.

Syamsu Rahim yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Sawahlunto berpasangan dengan Irzal Ilyas seorang pengusaha. Mereka merupakan calon dari Partai Golkar, PBB dan Partai Patriot. Pasangan ini terpilih karena masyarakat menganggap program yang mereka tawarkan menarik. Setidaknya demikianlah pendapat 68,8 persen dari jumlah responden yang mengaku memilih pasangan ini. Berdasarkan visi dan misi yang mereka sampaikan di depan Sidang Paripuran DPRD Kota Solok, pasangan ini berjanji akan berkonsentrasi pada perbaikan ekonomi kerakyatan. Perbaikan itu antara lain akan dilakukan melalui perhatian dan bantuan bagi peningkatan kapasitas dan

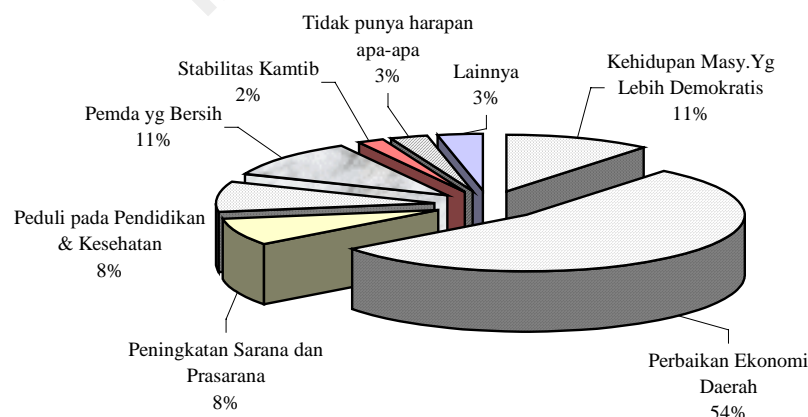
kualitas sumber daya manusia sebagai pelaku ekonomi dan tenaga kerja, pembukaan kran dan peluang investasi, perizinan investasi yang dipermudah, penyiapan sarana dan prasarana dasar dan peningkatan pelayanan. Keberadaan investasi tersebut ditujukan untuk menciptakan lapangan dan peluang kerja khususnya bagi tenaga kerja setempat (*Padang Ekspres*, 14 Juni 2005).

Syamsu Rahim dan Irzal Ilyas juga dipilih dengan alasan kesamaan agama (7,5 persen), alasan putra daerah (7,3 persen), dan karena figur (6,8 persen).

Responden yang tidak memilih pasangan Syamsu Rahim dan Irzal Ilyas ada sebanyak 22 persen. Sebagian besar dari mereka dapat menerima dengan lapang dada kemenangan pasangan ini (67 persen). Sementara sebanyak 30,1 persen menyatakan menerima dengan terpaksa, dan 2,2 persen menyatakan tidak dapat menerima

Mayoritas responden (89,5 persen) menyatakan optimis pasangan Syamsu Rahim dan Irzal Ilyas mampu memajukan dan mengembangkan Kota Solok. Sesuai program yang ditawarkan, lebih dari separoh responden (53,9 persen) berharap wali kota dan wakil wali kota terpilih dapat memperbaiki perekonomian daerah. Sementara 10,9 persen responden berharap terbentuknya pemerintahan daerah yang bersih, dan 10,7 persen berharap terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih demokratis (Gambar 5.2).

**Gambar 5.2. Persentase Responden menurut Prioritas Harapan terhadap Walikota/Wakil Walikota Terpilih**





## **Kabupaten Tanah Datar**

Pilkada di Tanah Datar diikuti oleh 62,8 persen pemilih. Sebagai bupati dan wakil bupati terpilih Shadiq Pasadique dan Aulizul Syuib yang meraih 51,1 persen dari total suara sah. Sementara hasil survei menunjukkan, dari 797 responden yang diwawancarai, 90,5 persen diantaranya mengaku menggunakan hak pilih dalam Pilkada ini. Di antara responden yang berpartisipasi dalam Pilkada tersebut, 82,4 persen mengaku memilih pasangan Shadiq Pasadique dan Aulizul Syuib.

Shadiq Pasadique sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala dinas peternakan Sumbar. Sementara wakilnya Aulizul Syuib adalah sekretaris kota Padang Panjang. Sebanyak 48,1 persen responden pemilih pasangan ini mengatakan tertarik dengan program yang ditawarkan.

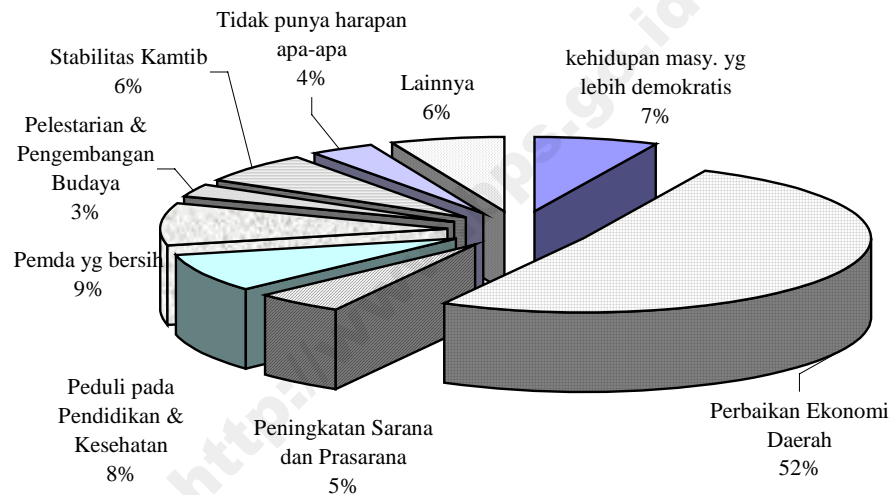
Apa saja yang ditawarkan pasangan Shadiq dan Aulizul? Berikut kutipan dari *Harian Padang Ekspres* tertanggal 16 Agustus 2005: Program yang ditawarkan antara lain program jangka pendek selama tiga bulan kerja yang mencakup memberantas dan mencegah segala bentuk penyakit masyarakat, membantu pengadaan Al-Qur'an dan surat Yasin bagi TPA/TPSA, kelompok Wirid Yasin dan Majelis Ta'lim di Kabupaten Tanah Datar, memberikan tunjangan bagi guru TPA/TPSA dan membantu meningkatkan sarana dan prasarana TPA/TPSA, membentuk pusat pengkajian adat dan syara' sebagai wadah untuk melakukan pengkajian dan pengembangan Islam dan kebudayaan Minangkabau, melakukan pengawasan yang ketat terhadap kebijakan pemerintah pusat tentang bebas biaya pendidikan bagi SD dan SLTP, meningkatkan anggaran pendidikan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Datar untuk menunjang peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain.

Alasan lain pemilihan pasangan Shadiq dan Aulizul adalah karena figur (19,5 persen), dan alasan karena pasangan tersebut adalah putra daerah (16,5 persen). Selebihnya alasan karena pengaruh orang lain, agama yang sama, parpol yang sama dan lain-lain.

Responden yang tidak memilih pasangan Shadiq dan Aulizul ada sebanyak 17,6 persen. Umumnya mereka dapat menerima dengan lapang dada kemenangan pasangan ini (80,5 persen). Sedang 8,8 persen menyatakan menerima dengan terpaksa, dan sebagian kecil yaitu 1,5 persen menyatakan tidak dapat menerima.

Sikap optimis masyarakat terhadap kinerja bupati dan wakil bupati terpilih tercermin dalam survei ini. Sebanyak 93,4 persen responden menyatakan optimis pasangan Shadiq dan Aulizul akan mampu memajukan Kabupaten Tanah Datar. Lebih dari separoh dari responden (51,1 persen) berharap bupati dan wakil bupati terpilih dapat memperbaiki perekonomian daerah. Sementara 9,1 persen responden berharap terbentuknya pemerintahan daerah yang bersih dan 8,4 persen berharap terbentuknya pemerintah yang peduli pada kesehatan dan pendidikan (Gambar 5.3).

**Gambar 5.3. Persentase Responden menurut Prioritas Harapan terhadap Bupati/Wakil Bupati Terpilih**



<http://www.bps.go.id>

1. Responden pada studi ini terdiri dari: pada Pilkada Gubernur 48,4 persen laki-laki dan 51,6 persen perempuan; pada Pilkada Bupati 48,9 persen laki-laki dan 51,1 persen perempuan; pada Pilkada Wali Kota 49,1 persen laki-laki dan 50,9 persen perempuan. Seperempat lebih responden berumur 50 tahun ke atas dan sekitar sepersepuluh berumur kurang dari 20 tahun. Lebih dari dua pertiga responden berstatus kawin. Sekitar 1,9 persen responden pada Pilkada Gubernur merupakan pendatang, 1,8 persen pada Pilkada Bupati dan 8,9 persen pada Pilkada Wali Kota.
2. Sekitar 96,7 persen responden pada Pilkada Gubernur bersuku bangsa Minang, 98,5 persen pada Pilkada Bupati dan 95,0 persen pada Pilkada Wali Kota. Responden sebagian besar (lebih dari 90 persen) menggunakan Bahasa Minangkabau sebagai bahasa yang dipakai sehari-hari dan hampir semua responden (99 persen) beragama Islam.
3. Responden sebagian besar menamatkan pendidikan pada tingkat SLTA yaitu 33,1 persen pada Pilkada Bupati, 46,4 persen pada Pilkada Wali Kota dan 11,3 persen pada Pilkada Gubernur. Dilihat aktifitas ekonomi, sekitar separoh dari responden melakukan kegiatan bekerja.
4. Sebagian besar responden (lebih dari 91 persen) yang tercakup pada studi ini adalah masyarakat yang tidak terikat dengan suatu partai, artinya bukan anggota ataupun simpatisan partai politik Demikian pula responden yang terikat dalam keanggotaan organisasi massa (ormas) keagamaan sangat sedikit yaitu tidak lebih dari enam persen.
5. Hampir semua masyarakat mengetahui adanya pelaksanaan Pilkada. Responden yang mengetahui Pilkada Gubernur mencapai 96,8 persen, pada Pilkada Bupati Tanah Datar mencapai 97,5 persen dan bahkan pada pemilihan Wali Kota Solok mencapai 99,2 persen.
6. Terdapat keterkaitan antara luas wilayah dengan cakupan masyarakat yang mengetahui pelaksanaan Pilkada, semakin luas wilayah semakin sedikit cakupan masyarakat yang mengetahui Pilkada dan sebaliknya.

7. Meskipun sosialisasi bukan keseluruhan tahapan dalam penyelenggaraan Pilkada, akan tetapi hasil studi menunjukkan bahwa semua tahapan Pilkada dapat dijadikan sebagai kesempatan untuk melakukan sosialisasi. Masyarakat Kota Solok (65,5 persen) lebih banyak yang mengakses pelaksanaan sosialisasi daripada masyarakat Kabupaten Tanah Datar (32,0 persen). Masyarakat Kabupaten Tanah Datar sebagian besar (48,5 persen) mengetahui penyelenggaraan Pilkada sejak tahap pendaftaran (pemutakhiran data).
8. Sumber informasi yang banyak memberikan informasi kepada masyarakat diantaranya adalah spanduk/baliho; pamflet/brosur/leaflet; surat kabar, majalah dsb; televisi, radio, dsb. Jenis sumber informasi tersebut bahkan relatif lebih banyak menjangkau masyarakat dibanding kampanye, terutama pada jenis televisi, radio, dsb dan pamflet/brosur/leaflet.
9. Pada Pilkada Gubernur dan Wali Kota Solok persentase sumber informasi terbesar terdapat pada televisi/radio diikuti pamflet/brosur/leaflet kemudian surat kabar/majalah dan spanduk/baliho. Sedangkan di Kabupaten Tanah Datar persentase terbesar terdapat pada pamflet/brosur diikuti spanduk/baliho kemudian televisi/radio dan surat kabar/majalah. Ini artinya penyebaran informasi Pilkada melalui media masa, baik cetak maupun elektronik efektif untuk masyarakat di Kota Solok. Sementara di Kabupaten Tanah Datar penyebaran informasi lebih efektif melalui spanduk/baliho dan pamflet/brosur/leaflet, yang terpasang di jalan raya/pasar/mal/terminal/stasiun/pelabuhan dan lingkungan pemukiman.
10. Masyarakat yang mengetahui adanya pendaftaran pemilih cukup tinggi yaitu sekitar 90,9 persen (Bupati), 93,1 persen (Gubernur) dan tertinggi 95,8 persen (Wali Kota). Kegiatan pemutakhiran (pendaftaran pemilih untuk Pilkada) data pemilih mampu menambah sekitar sepertiga jumlah pemilih.
11. Persentase yang sengaja tidak terdaftar lebih tinggi pada pemilihan Wali Kota Solok dibanding Bupati Tanah Datar dan Gubernur Sumatera Barat.
12. Tidak banyak responden yang mampu mengingat jumlah pasangan calon dalam Pilkada. Hanya sekitar separuh lebih sedikit responden yang mengetahui jumlah pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada. Demikian

pula responden yang tahu betul partai-partai yang mendukung pasangan calon sangat sedikit sekali yaitu kurang dari 10 persen. Ironisnya mereka sebagian besar berasal dari kalangan yang berpendidikan tinggi (SLTA ke atas).

13. Masyarakat yang pernah menghadiri/mengikuti kampanye sangat sedikit sekali. Persentase mereka yang menghadiri kampanye hanya mencapai 9,2 persen untuk Pilkada Gubernur, 12,5 persen untuk Pilkada Bupati dan 11,1 persen untuk Pilkada Wali Kota. Separoh dari mereka telah berumur 40 tahun ke atas dan berpendidikan SLTA atau lebih tinggi.
14. Jenis kampanye yang paling banyak dihadiri/diikuti oleh masyarakat adalah jenis tatap muka/dialog dan penyebaran bahan kampanye kepada umum. Terdapat perbedaan pola, pada Pilkada Bupati peserta kampanye relatif lebih tinggi pada jenis kampanye pemasangan alat peraga (32,0 persen) dibanding rapat umum (21,6 persen). Sebaliknya pada Pilkada Walikota persentase rapat umum relatif lebih besar dibanding pemasangan alat peraga, yaitu 35,2 persen berbanding 14,8 persen.
15. Kampanye yang sedianya bertujuan untuk menambah pendukung melalui penyampaian visi, misi dan program pasangan calon pada prakteknya hanya berfungsi sebagai sarana untuk meyakinkan para pemilih. Sebagian besar mereka yang mengikuti kampanye menyatakan tetap dengan pilihan
16. Selama proses pelaksanaan Pilkada, baik Gubernur Sumatera Barat, Bupati Tanah Datar, maupun Wali Kota Solok, berlangsung relatif aman, tidak ada konflik dan tidak ada gangguan keamanan. Suasana aman ini didukung oleh budaya musyawarah mufakat yang turun-temurun dan kesadaran sikap demokrasi yang tinggi. Sehingga dapat melaksanakan Pilkada dengan rasa kekeluargaan.
17. Jumlah pemilih yang terdaftar namun tidak menggunakan hak pilihnya atau dikenal dengan golput di Sumatera Barat rupanya cukup besar. Tercatat golput pada Pilkada Gubernur sebesar 35,7 persen, Pilkada Walikota Solok Bupati 37,4 persen, dan Pilkada Bupati Tanah Datar 34,2 persen. Besarnya angka golput ini rupanya sejalan dengan Pilkada di beberapa daerah lain, diantaranya di Kutai Kartanegara 29,3 persen, sementara di Blitar sebanyak 44 persen.

18. Jumlah mereka yang golput bahkan melebihi jumlah suara yang diraih pemenang Pilkada. Pada Pilkada Gubernur, pasangan pemenang Pilkada yaitu Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman berhasil meraih 757.269 suara, sedang jumlah golput 1.071.161 orang. Sementara pada Pilkada Walikota Solok, pasangan pemenang Syamsu Rahim dan Irzal Ilyas meraih 8.325 suara, sedang jumlah golput 14.007 orang. Selanjutnya pada Pilkada Bupati Tanah Datar jumlah suara yang diraih pasangan pemenang, Shadiq Pasadique dan Aulizul Syuib 72.774 suara, sementara jumlah golput 74.728 orang.
19. Walaupun sebelumnya pemerintah memprediksi bahwa golput di Pilkada akan rendah, fakta di atas membuktikan Pilkada secara langsung tidak sepenuhnya menyedot perhatian masyarakat. Banyak alasan mengapa masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Beberapa alasan yang berhasil diungkap survei ini antara lain sedang bepergian/dinas, tidak ada calon yang sesuai, tidak ada calon yang dikenal, dan alasan lain-lain yang mencakup sakit, malas, pindah tempat tinggal, tidak punya kartu pemilih, sibuk, dan apatis terhadap calon.
20. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya juga mempunyai alasan dalam memilih calon pemimpinnya. Hasil survei menunjukkan persentase responden yang memilih kepala daerah karena tertarik dengan program merupakan persentase terbesar. Hal ini berlaku untuk semua jenjang pendidikan, bahkan secara umum semakin tinggi jenjang pendidikan, terlihat semakin besar persentase responden yang memilih calon kepala daerah karena tertarik programnya. Dua alasan lainnya yang paling banyak diajukan responden adalah karena figur calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan alasan putra daerah.
21. Responden survei yang menyatakan memilih pasangan pemenang Pilkada, sebagian besar diantaranya mengaku memilih karena tertarik dengan program yang ditawarkan. Pada pilkada Gubernur sebanyak 46,7 persen responden menjawab memilih Gamawan Fauzi dan Marlis Rahman karena tertarik dengan program, 30,6 persen memilih karena figur calon gubernur/wakil gubernur, 8,9 persen memilih pasangan tersebut dengan alasan mereka adalah putra daerah, selebihnya memilih karena dari parpol yang sama, suku bangsa yang sama dan lain-lain. Sementara pada Pilkada

Walikota Solok sebanyak 68,8 persen responden menjawab memilih karena tertarik dengan program, karena kesamaan agama (7,5 persen), karena putra daerah (7,3 persen), dan karena figur (6,8 persen). Selanjutnya, pada Pilkada Bupati Tanah Datar sebanyak 48,1 persen responden memilih pasangan Shadiq Pasadique dan Aulizul Syuib mengatakan tertarik dengan program yang ditawarkan. Sebanyak 19,5 persen memilih karena figur, dan 16,5 persen karena putra daerah (16,5 persen). Selebihnya alasan karena pengaruh orang lain, agama yang sama, parpol yang sama dan lain-lain.

22. Mereka yang mengaku tidak memilih pasangan pemenang Pilkada, umumnya dapat menerima dengan baik kemenangan tersebut. Hanya sebagian kecil yang tidak dapat menerima yaitu sekitar 1,5 persen hingga 2,2 persen dari jumlah responden yang menyatakan bukan pemilih dari pemenang Pilkada.
23. Pada Pilkada Gubernur, sebanyak 91,5 persen responden optimis gubernur dan wakil gubernur terpilih dapat memajukan Sumatera Barat. Harapan utama masyarakat terhadap gubernur dan wakil gubernur terpilih diantaranya perbaikan perekonomian daerah (diharapkan oleh 47 persen responden). Terbentuknya pemerintahan daerah yang bersih (15,2 persen responden), dan terbentuknya pemerintahan daerah yang peduli pada pendidikan dan kesehatan (11,3 persen responden).
24. Mayoritas responden (89,5 persen) di Kota Solok menyatakan optimis pasangan Syamsu Rahim dan Irzal Ilyas mampu memajukan dan mengembangkan kota mereka. Sesuai program yang ditawarkan, lebih dari separoh responden (53,9 persen) berharap wali kota dan wakil wali kota terpilih dapat memperbaiki perekonomian daerah. Sementara 10,9 persen responden berharap terbentuknya pemerintahan daerah yang bersih, dan 10,7 persen berharap terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih demokratis.
25. Sementara di Tanah Datar, sebanyak 93,4 persen responden menyatakan optimis pasangan Shadiq Pasadique dan Aulizul Syuib akan mampu memajukan Kabupaten Tanah Datar. Lebih dari separoh responden (51,1 persen) berharap bupati dan wakil bupati terpilih dapat memperbaiki perekonomian daerah. Sementara 9,1 persen responden berharap



terbentuknya pemerintahan daerah yang bersih dan 8,4 persen berharap terbentuknya pemerintah yang peduli pada kesehatan dan pendidikan.

<http://www.bps.go.id>



## DAFTAR PUSTAKA

---

- Asri Harahap, A**, 2005: *Manajemen dan Resolusi Konflik Pilkada*. PT Pustaka Cidensindo. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam**, 1982: *Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bungai Rampai*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Budiardjo, Miriam**, 1994: *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Gramedia. Jakarta.
- Dana Kampanye Paling Minim, Andalkan Moralitas**,  
2005 Pontianak Post, 3 Juli 2005
- Demokrasi Lokal: Pilkada Langsung 2005**, Analisis CSIS,  
*Centre for Strategic and International Studies, Jakarta*
- Feith, Herbert**, 1982. *Pemikiran Politik Indonesia 1945-1965: Suatu Pengantar, dalam Miriam Budiardjo, 1982: Partisipasi dan Partai Politik, Sebuah Bungai Rampai*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Fenomena Golput dalam Pilkada**  
2005 Suara karya Online, 19 Juli 2005
- Gamawan Resmi Menang**  
2005 Republika 11 Juli 2005
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar**, Tahun 2005.
- Lima Pasangan Cagub Sumbar Janji Yang Sama**,  
2005 Detikcom, 10 Juni 2005
- Nomor Dua, Pasangan Terbaik**  
2005 Padang Ekspres, 16 Agustus 2005
- Panjaitan, Hinca IP, SH, MH**  
2004 Pemilu Bersih Untuk Pemimpin Bersih, Seri II,  
Indonesia Media Law & Policy Centre, Jakarta
- Panjaitan, Hinca IP, SH, MH**  
2004 Pemilu Bersih Untuk Pemimpin Bersih, Seri III,  
Indonesia Media Law & Policy Centre, Jakarta
- Panjaitan, Hinca IP, SH, MH**  
2004 Pemilu Bersih Untuk Pemimpin Bersih, Seri IV,  
Indonesia Media Law & Policy Centre, Jakarta
- Perbaiki Ekonomi Rakyat**  
2005 Padang Ekspres, 14 Juni 2005

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005** tentang Pemilihan, Pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah.

**Sabirin, Tabrani, MA**, 2000. *Mengantar Bangsa menuju Demokrasi: Peran & Sumbangsih KPU dalam Proses Demokrasi di Indonesia*. KPU-LPSI. Jakarta

**Tren Golput Mewarnai Pilkada 2005**,  
2005 Kompas 15 Desember 2005

<http://www.bps.go.id>

## Lampiran 1. Daerah yang Telah Melaksanakan Pilkada

### **NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

1. Kota Banda Aceh
2. Kota Sabang
3. Aceh Besar
4. Aceh Barat
5. Aceh Jaya
6. Nagan Raya
7. Aceh Tengah
8. Bener Meriah
9. Kota Lhokseumawe
10. Aceh Utara
11. Kota Langsa
12. Aceh Timur
13. Aceh Tamiang
14. Gayo Luwes
15. Aceh Singkil
16. Aceh Barat Daya

### **SUMATERA UTARA**

17. Humbang Hasundutan
18. Nias Selatan
19. Kota Medan
20. Serdang Bedagai
21. Kota Tebing Tinggi
22. Simalungun
23. Kota Pematang Siantar
24. Asahan
25. Kota Tanjung Balai
26. Labuhan Batu
27. Tapanuli Selatan
28. Mandailing Natal
29. Kota Sibolga

30. Toba Samosir

31. Samosir
32. Pakpak Barat
33. Karo
34. Kota Binjai

### **SUMATERA BARAT**

35. Solok
36. Tanah Datar
37. Solok Selatan
38. Kota Solok
39. Kab.Sawah Lunto/Sijunjung
40. Dharmasraya
41. Pasaman
42. Pasaman Barat
43. Pesisir Selatan
44. Padang Pariaman
45. Lima Puluh Kota
46. Agam
47. Kota Bukittinggi

### **RIAU**

48. Bengkalis
49. Kota Dumai
50. Indragiri Hulu

### **SUMATERA SELATAN**

51. Ogan Komering Ulu
52. Oku Timur
53. Oku Selatan
54. Ogan Ilir
55. Musi Rawas

### **BENGKULU**

56. Muko Muko
57. Seluma
58. Kaur
59. Rejang Lebong
60. Lebong
61. Kepahiang

### **LAMPUNG**

62. Lampung Selatan
63. Lampung Timur
64. Lampung Tengah
65. Way Kanan
66. Kota Bandar Lampung
67. Kota Metro

### **BANGKA BELITUNG**

68. Bangka Selatan
69. Bangka Tengah
70. Bangka Barat
71. Belitung Timur

### **KEPULAUAN RIAU**

72. Kep.Riau
73. Lingga
74. Natuna

**JAWA BARAT**

- 75. Sukabumi
- 76. Kota Depok
- 77. Bandung
- 78. Indramayu
- 79. Karawang

**JAWA TENGAH**

- 80. Blora
- 81. Boyolali
- 82. Kebumen
- 83. Kendal
- 84. Klaten
- 85. Kota Magelang
- 86. Kota Pekalongan
- 87. Purbalingga
- 88. Purworejo
- 89. Rembang
- 90. Kota Semarang
- 91. Sukoharjo
- 92. Semarang
- 93. Kota Surakarta
- 94. Wonogiri
- 95. Wonosobo

**D. I YOGYAKARTA**

- 96. Bantul
- 97. Gunung Kidul
- 98. Sleman

**JAWA TIMUR**

- 99. Ngawi
- 100. Ponorogo
- 101. Trenggalek

- 102. Kota Blitar
- 103. Kediri
- 104. Malang
- 105. Jember
- 106. Banyuwangi
- 107. Situbondo
- 108. Kota Pasuruan
- 109. Sidoarjo
- 110. Mojokerto
- 111. Lamongan
- 112. Gresik
- 113. Sumenep
- 114. Kota Surabaya

**BANTEN**

- 115. Pandeglang
- 116. Serang
- 117. Kota Cilegon

**BALI**

- 118. Jembrana
- 119. Tabanan
- 120. Badung
- 121. Karang Asem
- 122. Kota Denpasar
- 123. Bangli

**NUSA TENGGARA BARAT**

- 124. Kota Mataram
- 125. Lombok Tengah
- 126. Sumbawa
- 126. Sumbawa
- 127. Dompu
- 128. Bima

- 129. Sumbawa Barat

**NUSA TENGGARA TIMUR**

- 130. Ngada
- 131. Timor Tengah Utara
- 132. Flores Timur
- 133. Manggarai
- 134. Sumba Timur
- 135. Sumba Barat
- 136. Manggarai Barat

**KALIMANTAN BARAT**

- 137. Bengkayang
- 138. Ketapang
- 139. Sekadau
- 140. Sintang
- 141. Melawi
- 142. Kapuas Hulu

**KALIMANTAN TENGAH**

- 143. Kota Waringin Barat
- 144. Kota Waringin Timur

**KALIMANTAN SELATAN**

- 145. Kota Banjar Baru
- 146. Balangan
- 147. Tanah Bumbu
- 148. Hulu Sungai Tengah
- 149. Banjar
- 150. Kota Baru
- 151. Kota Banjarmasin

**KALIMANTAN TIMUR**

- 152. Pasir
- 153. Berau
- 154. Bulungan
- 155. Kota Samarinda

**KALIMANTAN TIMUR**

- 156. Kutai Kertanegara

**SULAWESI UTARA**

- 157. Kota Manado
- 158. Minahasa Utara
- 159. Kota Tomohon
- 160. Kota Bitung
- 161. Minahasa Selatan

**SULAWESI TENGAH**

- 162. Poso
- 163. Toli –Toli
- 164. Kota Palu
- 165. Tojo Una-Una

**SULAWESI SELATAN**

- 166. Pangkajene Kep
- 167. Gowa
- 168. Selayar
- 169. Luwu Utara
- 170. Bulu Kumba
- 171. Barru
- 172. Soppeng
- 173. Tana Toraja
- 174. Luwu Timur
- 175. Maros

**SULAWESI BARAT**

- 176. Mamuju
- 177. Mamuju Utara

**SULAWESI TENGGARA**

- 178. Konawe Selatan
- 179. Kolaka Utara
- 180. Wakatobi
- 181. Bombana
- 182. Muna

**GORONTALO**

- 183. Bone Bolango
- 184. Gorontalo
- 185. Pohuwato

**MALUKU**

- 186. Kepulauan Aru
- 187. Seram Bagian Barat
- 188. Seram Bagian Timur

**MALUKU UTARA**

- 189. Kota Ternate
- 190. Halmahera Barat
- 191. Halmahera Utara
- 192. Kota Tidore
- 193. Halmahera Timur
- 194. Halmahera Selatan
- 195. Kepulauan Sula

**PAPUA**

- 196. Sami
- 197. Keerom
- 198. Pegunungan Bintang

- 199. Yahukimo
- 200. Toli Kara
- 201. Waropen
- 202. Boven Digoel
- 203. Mappi
- 204. Asmat
- 205. Merauke
- 206. Supiori

**IRIAN JAYA BARAT**

- 207. Kota Jayapura
- 208. Yapen Waropen
- 209. Sorong Selatan
- 210. Raja Ampat
- 211. Fak-Fak
- 212. Teluk Bintuni
- 213. Teluk Wondama

**IRIAN JAYA BARAT**

- 214. Manokwari
- 215. Kaimana

<http://www.bps.go.id>



REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PUSAT STATISTIK

BPS

STUDI PENDAPAT MASYARAKAT  
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2005

RAHASIA

SPM-KD2005

BLOK I PENGENALAN TEMPAT		
101. Propinsi		<input type="text"/>
102. Kabupaten/Kota *)		<input type="text"/>
103. Kecamatan		<input type="text"/>
104. Desa/Kelurahan		<input type="text"/>
105. Klasifikasi Desa	1. Perkotaan                      2. Pedesaan	<input type="text"/>
106. Nomor Blok Sensus		
107 Nomor Urut Rumah tangga		<input type="text"/>
BLOK II KETERANGAN PENCACAHAN		
201. Nama : .....	202. Tanggal : .....	203. Tanda Tangan : .....
BLOK III KARAKTERISTIK RESPONDEN (UMUR ≥ 17 TAHUN)		
301. Apakah 6 bulan yang lalu sudah tinggal di Kabupaten/Kota*) ini?	1. Ya                      2. Tidak → (GANTI RESPONDEN)	<input type="text"/>
302.a. Nomor urut responden		<input type="text"/>
302.b. Hubungan dengan Kepala Rumah tangga	1. Kepala Rumah tangga    2. Istri/Suami    3. Anak    4. Lainnya	<input type="text"/>
303. Umur		<input type="text"/>
304. Jenis kelamin	1. Laki-Laki                      2. Perempuan	<input type="text"/>
305. Status perkawinan	1. Belum kawin    2. Kawin    3. Cerai hidup    4. Cerai mati	<input type="text"/>
306. Suku bangsa		<input type="text"/>
307. Agama	1. Islam                      5. Buddha 2. Kristen Protestan                      6. Kong Hu Cu 3. Kristen Katolik                      7. Lainnya ( ..... ) 4. Hindu	<input type="text"/>
308. Ormas yang berazaskan agama yang diikuti	1. Nahdatul Ulama (NU)                      4. Ormas lainnya ( ..... ) 2. Muhammadiyah                      5. Tidak ikut ormas 3. Persatuan Islam	<input type="text"/>
309. Bahasa yang biasa dipakai sehari-hari?	1. Bahasa Indonesia                      3. Bahasa asing ( ..... ) 2. Bahasa daerah ( ..... )	<input type="text"/>
310. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	1. Tidak pernah sekolah    4. SLTP sederajat    7. Diploma III/Sarmud 2. Tidak tamat SD    5. SLTA sederajat    8. Diploma IV/S1 3. SD sederajat    6. Diploma I/II    9. S2/S3	<input type="text"/>
311. Kegiatan utama	1. Bekerja                      4. Mencari pekerjaan 2. Sekolah                      5. Lainnya ( ..... ) 3. Mengurus rumah tangga	<input type="text"/>
312. Tempat lahir Kab/Kota *) : ..... Propinsi : .....	<input type="text"/>	313. Tempat tinggal lima tahun yang lalu Kab/Kota*) : ..... Propinsi : .....

**Keterangan: \*) Coret yang tidak perlu**



314a. Apakah Anda menjadi anggota/simpatisan partai politik?	1. Ya, Anggota      2. Ya, Simpatisan      3. Tidak → <b>ke Blok IV</b>	<input type="checkbox"/>	
314b. Nama partai politik?	.....	<input type="checkbox"/>	
315. <b>Bila P.314a berkode 1</b> , apa kedudukan dalam partai politik?	1. Pengurus      2. Anggota	<input type="checkbox"/>	
<b>BLOK IV PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN</b>			
<b>BLOK IVA PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH</b>		<b>BUPATI/ WALIKOTA</b>	<b>GUBERNUR</b>
401. Tahapan apa yang Anda ketahui dalam pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur?	1. Pendaftaran      8. Penghitungan dan penetapan hasil 2. Kampanye      16. Pelantikan 4. Pencoblosan      98. Tidak tahu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402a. Apakah Anda mengetahui telah diadakan pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur di daerah ini?	1. Ya      2. Tidak → <b>STOP</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
402b. Kapan Anda mengetahui akan diadakan pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur di daerah ini?	1. Sebelum pendaftaran 2. Pada saat pendaftaran pemilih 3. Sesudah pendaftaran pemilih 4. Pada saat pencoblosan 5. Setelah selesai pemilihan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
403. Dari mana Anda mengetahui diadakan pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur di daerah ini?  (Bacakan Jawaban)	a. Penyuluhan      1. Ya      2. Tidak	a. <input type="checkbox"/>	a. <input type="checkbox"/>
	b. Spanduk/Baliho      1. Ya      2. Tidak	b. <input type="checkbox"/>	b. <input type="checkbox"/>
	c. Pamflet/brosur/leaflet      1. Ya      2. Tidak	c. <input type="checkbox"/>	c. <input type="checkbox"/>
	d. Surat kabar, majalah dsb      1. Ya      2. Tidak	d. <input type="checkbox"/>	d. <input type="checkbox"/>
	e. Televisi, radio, dsb      1. Ya      2. Tidak	e. <input type="checkbox"/>	e. <input type="checkbox"/>
	f. Kampanye      1. Ya      2. Tidak	f. <input type="checkbox"/>	f. <input type="checkbox"/>
	g. Lainnya (.....)      1. Ya      2. Tidak	g. <input type="checkbox"/>	g. <input type="checkbox"/>
403A. Lihat jawaban P. 403a	1. Ya      2. Tidak → <b>ke P. 406A</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
404. Siapa penyelenggara penyuluhan?	1. KPUD/PPK/PPS 2. Tokoh agama/tokoh masyarakat 3. Lainnya (.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
405. Sarana apa yang digunakan untuk kegiatan penyuluhan?	1. Forum keagamaan 2. Mengumpulkan masyarakat 3. Lainnya (.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
406. Materi apa saja yang diberikan waktu penyuluhan?	a. Tahapan pemilihan      1. Ya      2. Tidak b. Memperkenalkan pasangan calon      1. Ya      2. Tidak c. Cara pencoblosan      1. Ya      2. Tidak d. Lainnya (.....)      1. Ya      2. Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
406A. Lihat jawaban P. 403b	1. Ya      2. Tidak → <b>ke P. 408</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
407. Di mana Anda pernah melihat dipasang pemberitahuan tentang diadakan pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur daerah Anda?	a. Kantor Gubernur dan Bupati/Walikota      1. Ya      2. Tidak	a. <input type="checkbox"/>	a. <input type="checkbox"/>
	b. Kantor kecamatan      1. Ya      2. Tidak	b. <input type="checkbox"/>	b. <input type="checkbox"/>
	c. Kantor Desa/Kelurahan      1. Ya      2. Tidak	c. <input type="checkbox"/>	c. <input type="checkbox"/>
	d. Perkantoran/Kantor pemerintahan      1. Ya      2. Tidak	d. <input type="checkbox"/>	d. <input type="checkbox"/>
	e. Jalan raya/Pasar/Mall/Perkantoran Terminal/Stasiun/Pelabuhan      1. Ya      2. Tidak	e. <input type="checkbox"/>	e. <input type="checkbox"/>
	f. Lingkungan permukiman      1. Ya      2. Tidak	f. <input type="checkbox"/>	f. <input type="checkbox"/>
	g. Lainnya (.....)      1. Ya      2. Tidak	g. <input type="checkbox"/>	g. <input type="checkbox"/>
408. Apakah Anda mengetahui adanya pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur?	1. Ya      2. Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
409. Apakah Anda terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur?	1. Ya      2. Tidak → <b>ke P.411</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
409A. Lihat jawaban P. 408	1. Ya      2. Tidak → <b>ke P.411</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
410. Kapan Anda didaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur?	1. Pada saat pendaftaran pemilih Pemilu 2004 2. Pada saat pendaftaran pemilih untuk Pilkada 3. Setelah pengumuman daftar pemilih sementara 4. Tidak tahu } <b>ke P.414</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

411. Apakah alasan Anda sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih?	1. Tidak ada ditempat 2. Tidak ada petugas pendaftar yang datang 3. Sengaja tidak mau daftar 4. Lainnya (.....) ➔ ke P.418	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
412. Apakah Anda berusaha mendaftarkan sebagai pemilih?	1. Ya 2. Tidak ➔ ke P.418	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
413. Bagaimana usaha Anda agar terdaftar sebagai pemilih?	1. Mendaftar ke RT/RW 2. Mendaftar ke PPK/PPS 3. Mendaftar ke kantor desa/kel/kec 4. Lainnya (.....) } P.418	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
414. Apakah Anda mempunyai kartu identitas diri yang digunakan untuk pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur?	1. Ya 2. Tidak ➔ ke P. 418	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
415. Identitas diri yang digunakan untuk pencoblosan dalam pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur?	1. Kartu pemilih 2. Undangan pemilihan/pencoblosan 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 4. Lainnya (.....) } P.417	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
416. Apakah kartu pemilih tersebut sesuai dengan identitas diri Anda?	1. Ya, sesuai dengan identitas diri 2. Tidak, menggunakan identitas diri orang lain } ke. P. 418	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
417. Apakah alasan Anda tidak menggunakan kartu pemilih pada saat pencoblosan?	1. KPUD tidak mengeluarkan kartu pemilih 2. Terlambat didaftar 3. Kartu pemilih hilang 4. Lainnya (.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
418. Apakah Anda mengetahui ada tetangga Anda yang tidak terdaftar sebagai pemilih?	1. Ya 2. Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
419. Berapa pasang calon kepala daerah yang Anda ketahui mendaftar ke KPUD?	..... pasang (Jika tidak tahu kode 8, lanjut ke P.422)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
420. Berapa pasang calon kepala daerah yang sudah diterima di KPUD yang Anda ketahui?	..... pasang (Jika tidak tahu kode 8, lanjut ke P.422)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
421. Sebutkan nama parpol yang mengusulkan pasangan calon Bupati/Walikota/Gubernur yang menjadi kontestan?	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
422. Sebutkan nama kontestan pada pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur Anda?	1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. ....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
423. Dari mana Anda mengetahui kontestan pada pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur tersebut?	1. Tokoh masyarakat/tokoh agama 2. Aparat lingkungan 3. Pimpinan daerah sebelumnya 4. Media massa 5. Pamflet/brosur/poster 6. Waktu kampanye 7. Lainnya (.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>BLOK IVB KAMPANYE</b>		<b>BUPATI/ WALIKOTA</b>	<b>GUBERNUR</b>
424. Apakah Anda pernah hadir/ikut kampanye dalam pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur?	1. Ya 2. Tidak ➔ ke P. 428	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
425. Bentuk kampanye yang Anda pernah hadir/ikut pada pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur?	a. Pertemuan terbatas b. Tatap muka dan dialog c. Penyebaran/penyiaran melalui media cetak/elektronik d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum e. Pemasangan alat peraga f. Rapat umum g. Debat antar calon h. Lainnya (.....) 1. Ya 2. Tidak 1. Ya 2. Tidak 1. Ya 2. Tidak 1. Ya 2. Tidak 1. Ya 2. Tidak 1. Ya 2. Tidak 1. Ya 2. Tidak 1. Ya 2. Tidak	a. <input type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/> c. <input type="checkbox"/> d. <input type="checkbox"/> e. <input type="checkbox"/> f. <input type="checkbox"/> g. <input type="checkbox"/> h. <input type="checkbox"/>	a. <input type="checkbox"/> b. <input type="checkbox"/> c. <input type="checkbox"/> d. <input type="checkbox"/> e. <input type="checkbox"/> f. <input type="checkbox"/> g. <input type="checkbox"/> h. <input type="checkbox"/>
426. Apakah motivasi utama Anda mengikuti kampanye pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur?	1. Mensukseskan kampanye 2. Mengetahui program dari calon kepala daerah 3. Mendapatkan hiburan gratis 4. Mendapat imbalan uang/barang 5. Memperoleh berbagai atribut pasangan calon 6. Diajak teman/ikut-ikutan 7. Dipaksa pihak lain 8. Lainnya (.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
427. Bagaimana sikap Anda setelah ikut kampanye pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur?	1. Tetap dengan pilihan 2. Menjadi ragu-ragu 3. Tetap tidak punya pilihan 4. Merubah pilihan 5. Tidak tahu/tidak menjawab } P.429	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
428. Apakah alasan utama Anda tidak ikut kampanye pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur?	1. Tidak tertarik 2. Tidak ada waktu luang 3. Tidak ada imbalannya 4. Karena peraturan 5. Tidak tahu/Tidak menjawab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BLOK IVC PENCOBLOSAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		BUPATI/ WALIKOTA	GUBERNUR																		
429. Berapa putaran pemilihan Bupati/Walikota/ Gubernur Anda?	1. Satu putaran                      2. Dua putaran	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
430. Apakah Anda menggunakan hak pilih dalam pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur?	1. Ya      ➔ ke P. 432                      2. Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
431. Apakah alasan utama Anda tidak menggunakan hak pilih?	1. Tidak ada calon yg dikenal      5. Tidak ada yang sesuai 2. Tidak terdaftar                      6. Sedang bepergian/dinas 3. Tidak sempat/terlat ke TPS      7. Lainnya, (.....) 4. Tidak punya hak pilih                      P.434	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
432. Apakah alasan utama Anda mengikuti pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur?	1. Untuk memilih pemimpin yang tepat      4. Dipaksa pihak lain 2. Ikut – ikutan                      5. Lainnya (.....) 3. Karena ada yang membayar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
433. Apakah alasan utama Anda memilih salah satu pasangan calon Bupati/Walikota/Gubernur?	1. Tertarik dengan program                      6. Pengaruh orang lain 2. Dari partai politik yang sama                      7. Figur calon Gubernur 3. Dari agama yang sama                      8. Paksaan orang lain 4. Dari suku bangsa yang sama                      9. Lainnya (.....) 5. Putra daerah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
434. Apakah partai politik yang Anda pilih pada Pemilu legislatif (April 2004)	1. DPRD Kab/Kota: ..... 2. DPRD Propinsi : ..... 3. DPR Pusat : .....	1.. <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> 2.. <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> 3. <table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>																			
BLOK V KEAMANAN		BUPATI/ WALIKOTA	GUBERNUR																		
501. Apakah Anda mengetahui adanya gangguan keamanan di wilayah desa/ kelurahan Anda pada proses pemilihan Gubernur?	1. Ya                      2. Tidak      ➔ ke P. 601	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
502. Jenis gangguan keamanan apa saja yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur?	a. Bentrok fisik                      1. Ya      2. Tidak b. Intimidasi/teror                      1. Ya      2. Tidak c. Perusakan bangunan                      1. Ya      2. Tidak d. Sabotase                      1. Ya      2. Tidak e. Peledakan bom                      1. Ya      2. Tidak f. Lainnya (.....)                      1. Ya      2. Tidak	a. <table border="1"><tr><td></td></tr></table> b. <table border="1"><tr><td></td></tr></table> c. <table border="1"><tr><td></td></tr></table> d. <table border="1"><tr><td></td></tr></table> e. <table border="1"><tr><td></td></tr></table> f. <table border="1"><tr><td></td></tr></table>							a. <table border="1"><tr><td></td></tr></table> b. <table border="1"><tr><td></td></tr></table> c. <table border="1"><tr><td></td></tr></table> d. <table border="1"><tr><td></td></tr></table> e. <table border="1"><tr><td></td></tr></table> f. <table border="1"><tr><td></td></tr></table>												
503. Jenis gangguan keamanan apa yang paling banyak kejadian pada saat pelaksanaan pemilihan Bupati/Walikota/Gubernur di daerah Anda?      (Bila P.502 yang berkode 1 > 1)	1. Bentrok fisik                      4. Intimidasi/teror 2. Perusakan bangunan                      5. Sabotase 3. Peledakan bom                      6. Lainnya (.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
504. Bagaimana sifat gangguan keamanan tersebut?	1. Antar kelompok pendukung 2. Antara kelompok pendukung dan petugas penyelenggara 4. Antara kelompok pendukung dan petugas keamanan 8. Lainnya (.....)	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>																
505. Apakah gangguan keamanan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan Bupati/Walikota/ Gubernur Anda sampai menimbulkan korban jiwa (meninggal dunia)?	1. Ya                      2. Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
BLOK VI SIKAP DAN HARAPAN MASYARAKAT		BUPATI/ WALIKOTA	GUBERNUR																		
601. Apakah Bupati/Walikota/Gubernur yang terpilih sesuai dengan pilihan Anda	1. Ya      ➔ ke P. 603                      2. Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
602. Bagaimana sikap Anda terhadap Bupati/ Walikota/Gubernur terpilih?	1. Menerima dengan lapang dada 2. Menerima dengan terpaksa 3. Tidak menerima	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
603. Apakah Bupati/Walikota/Gubernur terpilih sudah sesuai dengan harapan Anda?	1. Ya                      2. Tidak	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
604. Bagaimana tanggapan Anda terhadap Bupati/Walikota/Gubernur terpilih dalam memajukan/ mengembangkan daerah?	1. Optimis                      2. Tidak optimis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																		
605. Apakah prioritas harapan Anda pada pasangan Bupati/Walikota/Gubernur terpilih?	Lihat kode jawaban dibawah ini (Jawaban jangan dibacakan)	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>																

## **PEDOMAN PENGISIAN DAFTAR**

Studi tentang partisipasi dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada 2005 menggunakan satu daftar pertanyaan yaitu kuesioner SPM-KD2005. Berikut ini diuraikan tata cara pengisian daftar.

### **Tata Cara Pengisian Daftar Studi Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pilkada 2005 (SPM-KD2005)**

Daftar pertanyaan studi persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan (gubernur/bupati/wali kota) Pilkada 2005 terdiri dari 7 (tujuh) blok, yaitu Blok I. Pengenalan Tempat, Blok II. Keterangan Pencacahan, Blok III. Karakteristik Responden (Umur  $\geq$  17 tahun), Blok IV. Persiapan dan Pelaksanaan pemilihan Bupati/Wali kota/Gubernur, Blok V. Keamanan Bupati/Wali kota/Gubernur, Blok VI. Sikap dan Harapan Masyarakat Terhadap Bupati/ Wali kota/Gubernur, Blok VII. Catatan.

#### **Blok I. Pengenalan Tempat**

Blok ini mencatat lokasi atau tempat tinggal responden pada saat diwawancarai pada pelaksanaan studi pendapat masyarakat tentang Pemilihan Kepala Daerah (bupati/ wali kota/gubernur) 2005.

#### **Pertanyaan 101-107: Tuliskan nama provinsi, kabupaten/kota.**

Tuliskan nama dan kode propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa/kelurahan, nomor blok sensus, nomor sub blok sensus, nomor kode sampel dan nomor urut sampel rumah tangga. Untuk yang bertanda bintang, coret keterangan yang tidak sesuai. Tuliskan nama provinsi dan kabupaten/kota kemudian isikan kode pada kotak yang disediakan.

#### **Blok II. Keterangan Pencacahan**

Blok ini mencatat keterangan petugas yaitu nama, tanggal pencacahan dan tanda tangan pencacahan. Pencatatan keterangan pencacahan pada blok ini sangat berguna sebagai bentuk tanggungjawab dari pewawancara terhadap keseluruhan pengisian daftar.

**Pertanyaan 201-203: Nama, tanggal wawancara/pemeriksaan dan tanda tangan.**

Tuliskan nama pewawancara dan tanggal wawancara pada tempat yang disediakan. Bubuhkan pula tanda tangan pewawancara dan pengawas/pemeriksa sebagai bukti bahwa isian yang tertulis dalam daftar merupakan isian yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Blok III Karakteristik Responden**

Blok ini digunakan untuk mencatat informasi keterangan responden yang menyangkut keterangan demografi, tingkat pendidikan dan kegiatan utama responden.

**Pertanyaan 301: Apakah 6 bulan yang lalu sudah tinggal di kabupaten/kota ini?**

Tanyakan kepada responden, apakah 6 bulan yang lalu sudah tinggal di kabupaten/kota tempat responden saat ini. Bila jawaban berkode 1 lanjutkan pertanyaan ke pertanyaan selanjutnya. Bila jawaban berkode 2 **ganti responden**.

**Pertanyaan 302.a: Nomor urut responden**

Tuliskan nomor urut responden pada kotak yang disediakan. Pemberian nomor urut responden 01 adalah untuk responden yang berumur paling tua dan nomor urut responden 02 adalah untuk responden yang berumur paling muda

**Pertanyaan 302.b: Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga**

Tanyakan hubungan responden dengan kepala rumah tangga dan isikan kode yang sesuai pada kotak yang tersedia. Responden tidak harus kepala rumah tangga, tetapi ditentukan berdasarkan usia/umur, yaitu anggota rumah tangga yang berhak memilih yang berumur paling tua dan paling muda. Hubungan dengan kepala rumah tangga dikalsifikasikan dalam empat kelompok yaitu:

**Kepala rumah tangga** adalah, orang yang bertanggung jawab/dituakan dalam suatu rumah tangga.

**Istri/Suami** adalah, Istri/Suami kepala rumah tangga

**Anak** adalah, mencakup anak kandung, anak tiri, dan anak angkat kepala rumah tangga.

**Lainnya** adalah:

- Menantu, yaitu suami/istri dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat;
- Cucu, yaitu anak dari anak kandung, anak tiri, atau anak angkat;
- Orang tua/mertua, yaitu bapak/ibu dari kepala rumah tangga atau bapak/ibu dari istri/suami kepala rumah tangga;
- Famili lain, yaitu mereka yang ada hubungan famili dengan kepala rumah tangga atau dengan istri/suami kepala rumah tangga, misalnya adik, kakak, bibi, paman, kakek, atau nenek;
- Pembantu rumah tangga, yaitu orang yang bekerja sebagai pembantu yang menginap di rumah tangga tersebut dengan menerima upah/gaji baik berupa uang ataupun barang.

**Pertanyaan 303: Umur**

Tanyakan umur responden dalam tahun, kemudian tuliskan pada kotak yang disediakan. Pada rincian ini harus ada isian umur responden.

**Pertanyaan 304: Jenis kelamin**

Lingkari kode jenis kelamin responden, kemudian tuliskan kode yang dilingkari pada kotak yang disediakan.

**Pertanyaan 305: Status perkawinan**

Tanyakan status perkawinan responden dan lingkari kode yang sesuai, kemudian tuliskan kode yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

**Belum kawin**, adalah responden yang masih membujang dan belum pernah menikah.

**Kawin**, adalah apabila responden masih terikat dalam perkawinan.

**Cerai Hidup**, adalah berpisah sebagai suami/istri karena bercerai. Termasuk bercerai bagi responden yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum.

**Cerai mati**, adalah ditinggal mati oleh suami/istri dan sampai saat wawancara belum mempunyai ikatan perkawinan lagi yang sah menurut hukum.

**Pertanyaan 306: Suku bangsa**

Tanyakan suku bangsa responden dan lingkari kode yang sesuai, kemudian tuliskan kode yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

**Pertanyaan 307: Agama**

Tanyakan agama responden dan lingkari kode yang sesuai, kemudian tuliskan kode yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

**Pertanyaan 308: Ormas yang berazas agama yang diikuti**

Tanyakan Ormas yang berazas agama yang diikuti responden dan lingkari kode yang sesuai, kemudian tuliskan kode yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

**Pertanyaan 309: Bahasa yang biasa dipakai sehari-hari**

Tanyakan bahasa yang dipakai sehari-hari responden dan lingkari kode yang sesuai, kemudian tuliskan kode yang dilingkari pada kotak yang tersedia.

**Bahasa yang dipakai sehari-hari** adalah bahasa yang paling sering digunakan di keluarga maupun berkomunikasi dengan orang lain.

**Pertanyaan 310: Pendidikan tertinggi yang ditamatkan**

Tanyakan pendidikan tertinggi yang ditamatkan responden. Lingkari salah satu jawaban yang sesuai dengan ijazah terakhir/tertinggi yang dimiliki responden dan pindahkan ke kotak kode yang tersedia.

**Tidak pernah sekolah**, adalah seseorang yang tidak pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu sekolah formal.

**Tidak tamat SD**, adalah seseorang yang pernah mengikuti dan tidak tamat pendidikan tingkat SD/ sederajat (misalnya; Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Rakyat).

**SD/sederajat**, adalah tamat Sekolah Dasar atau yang sederajat.

**SLTP/sederajat**, adalah tamat sekolah lanjutan tingkat pertama baik umum maupun kejuruan, madrasah tsanawiyah atau yang sederajat.

**SLTA/sederajat**, adalah tamat Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah atau yang sederajat.

**Akademi/Perguruan Tinggi**, adalah seseorang yang telah tamat dalam suatu program DI/DII/DIII, DIV/S1, atau S2/S3 pada suatu lembaga pendidikan formal yang khusus diberikan untuk program diploma maupun pada suatu perguruan tinggi.

**Pertanyaan 311: Kegiatan utama**

Tanyakan tentang kegiatan utama responden. Lingkari salah satu jawaban yang sesuai, dan tuliskan kode yang dilingkari pada kotak yang disediakan. Bila mempunyai dua atau lebih jenis kegiatan, kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan waktu terbanyak.

**Bekerja** adalah melakukan kegiatan dengan maksud untuk memperoleh (termasuk membantu memperoleh) upah/gaji, pendapatan atau keuntungan.

**Sekolah** adalah seseorang yang pada saat pencacahan sedang menyelesaikan pendidikan formal termasuk juga yang sedang duduk dibangku perguruan tinggi.

**Mengurus rumahtangga** adalah suatu kegiatan yang biasa dilakukan oleh ibu rumahtangga, seperti menyapu, memasak, mengasuh anak.

**Mencari pekerjaan** adalah seseorang yang pada saat pencacahan sedang melakukan kegiatan mencari pekerjaan ataupun yang sedang menganggur.

**Lainnya** adalah seperti orang jompo, orang yang sakit sehingga tidak dapat melakukan suatu kegiatan.

**Pertanyaan 312: Tempat lahir responden**

Tanyakan tentang kabupaten/kota dan propinsi tempat lahir responden. Isikan kode kabupaten dan propinsi tempat lahir responden pada kotak yang tersedia.

**Pertanyaan 313: Tempat tinggal responden lima tahun yang lalu**

Tanyakan tentang kabupaten/kota dan propinsi tempat tinggal responden lima tahun yang lalu. Isikan kode kabupaten dan propinsi tempat tinggal responden lima tahun yang lalu pada kotak yang disediakan.



**Pertanyaan 314.a: Apakah anda menjadi anggota/simpatian partai politik (Parpol)?**

Tanyakan responden tentang keanggotaan partai politik (Parpol) dari responden. Lingkari salah satu jawaban yang sesuai, dan tuliskan kode yang dilingkari pada kotak yang disediakan, anggota partai politik (parpol) adalah ..... dan simpatian adalah.....

**Pertanyaan 314.b: Nama partai politik?**

Tanyakan kepada responden, tentang nama partai politik dimana responden menjadi anggota/simpatian. Tuliskan kode partai sesuai nomor urut pada pemilu legislatif 21 April 2004.

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. PNI Marhaenisme                     | 13. Partai Amanan Nasional (PAN)      |
| 2. Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSO) | 14. Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) |
| 3. Partai Bulai Bintang (PBB)          | 15. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)   |
| 4. Partai Merdeka                      | 16. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)   |
| 5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)  | 17. Partai Bintang Reformasi (PBR)    |
| 6. Partai (PPDK)                       | 18. Partai (PDIP)                     |
| 7. Partai (PPIB)                       | 19. Partai Damei Sejahtera (PDS)      |
| 8. Partai (PNBK)                       | 20. Partai Golongan Karya (GOLKAR)    |
| 9. Partai Demokrat                     | 21. Partai Patriot Pancasila          |
| 10. Partai (PKPI)                      | 22. Partai Serikat Indonesia (PSI)    |
| 11. Partai Demokrasi Indonesia (PPDI)  | 23. Partai Persatuan Daerah (PPDI)    |
| 12. Partai (PPNUI)                     | 24. Partai Pelopor                    |

**Pertanyaan 315: Bila Pertanyaan 314.a Berkode 1, Apakah kedudukan dalam partai politik?**

Pertanyaan ini ditanyakan apabila di Pertanyaan 314.a berkode 1 (anggota partai politik). Tanyakan kedudukan responden dalam partai. Lingkari salah satu jawaban yang sesuai, dan tuliskan kode yang dilingkari pada kotak yang disediakan.

## **Blok IV. Persiapan dan Pelaksanaan pemilihan Bupati/Wali kota/Gubernur**

Pertanyaan dalam blok ini dimaksudkan untuk memperoleh keterangan tentang kepedulian dan respon masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan Bupati/Wali kota/ Gubernur 2005. Partisipasi masyarakat mengikuti tahapan pelaksanaan Bupati/ Wali kota/Gubernur yang dimulai dari persiapan, masa kampanye sampai pada saat pencoblosan dan penghitungan suara. Blok IV ini terdiri dari 3 (tiga) sub blok yaitu Blok IVA. Persiapan Bupati/Wali kota/Gubernur 2005, Blok IVB. Kampanye dan Blok IVC. Pencoblosan dan Penghitungan Suara.

### **Blok IVA. Persiapan Pilkada 2005**

Pertanyaan pada sub blok ini berisi tentang persiapan Pilkada 2005 dimulai dari sosialisasi pelaksanaan bupati/wali kota/gubernur, pendaftaran pemilih, partisipasi dalam pendaftaran, pengenalan/pengetahuan calon pasangan kepala daerah, dan pengetahuan tentang bupati/wali kota/gubernur.

#### **Pertanyaan 401: Tahapan apa saja yang Anda Ketahui dalam pemilihan Bupati/ Wali kota/Gubernur?**

Tanyakan kepada responden tentang tahapan apa saja yang diketahui dalam pemilihan bupati/wali kota/gubernur. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia. **(jawaban jangan disebutkan)**. Jawaban pada pertanyaan ini boleh lebih dari satu.

#### **Pertanyaan 402.a: Apakah Anda mengetahui telah diadakan pemilihan Bupati/ Wali kota Gubernur di daerah ini?**

Tanyakan kepada responden apakah mengetahui telah diadakan pemilihan bupati/wali kota/gubernur di daerah ini. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia. Bila jawaban kode 2 maka pertanyaan selesai, dan lanjutkan ke responden berikutnya.

**Pertanyaan 402.b: Apakah Anda mengetahui diadakan pemilihan Bupati/Wali kota Gubernur di daerah ini?**

Tanyakan kapan responden mengetahui telah diadakan pemilihan bupati/wali kota/gubernur di daerah ini. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

**Pada saat pendaftaran pemilih**, adalah seseorang yang mengetahui diadakan pemilihan bupati/wali kota/gubernur sebelum responden terdaftar sebagai pemilih.

**Sebelum pendaftaran pemilih**, adalah seseorang yang mengetahui diadakan pemilihan bupati/wali kota/gubernur sebelum responden terdaftar sebagai pemilih.

**Sesudah pendaftaran pemilih**, adalah seseorang yang mengetahui akan diadakan pemilihan bupati/wali kota/gubernur setelah diumumkan Daftar pemilih sementara (DPS).

**Pada saat pencoblosan**, adalah seseorang yang mengetahui diadakan pemilihan bupati/wali kota/gubernur pada hari pencoblosan.

**Setelah selesai pemilihan**, adalah seseorang yang mengetahui diadakan pemilihan bupati/wali kota/gubernur setelah pelaksanaan pencoblosan.

**Pertanyaan 403: Darimana anda mengetahui diadakan pemilihan Bupati/Wali kota/ Gubernur di daerah anda?**

Tanyakan dari mana (sumber) responden mengetahui bahwa didaerahnya diadakan pemilihan bupati/wali kota/gubernur dan (jawaban mohon dibacakan). Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia. P.403a berkode 1 maka rincian 404 ditanyakan. Bila P.403a berkode 2 maka P.404 s.d. P.406 tidak perlu ditanyakan. Bila P.403b berkode 1 maka rincian 407 ditanyakan. Bila P.403a dan P.403b berkode 2, maka P.404 s.d. P.407 tidak perlu ditanyakan.

**Penyuluhan**, adalah cara memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pemilihan bupati/wali kota/gubernur yang dilakukan secara tatap muka langsung oleh (team) penyuluh kepada masyarakat.

**Spanduk**, adalah kain rentang yang berisi propaganda tentang pemilihan bupati/wali kota/gubernur.

**Baliho**, adalah publikasi tentang pemilihan bupati/wali kota/gubernur dengan gambar yang besar ditempat-tempat ramai.

**Pamflet**, adalah selebaran yang berisi keterangan tentang bupati/wali kota/gubernur.

**Brosur**, adalah selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat, tetapi lengkap tentang bupati/wali kota/gubernur.

**Surat kabar/majalah dsb**, adalah berita/iklan tentang pilihan bupati/wali kota/gubernur yang dimuat dalam surat kabar/majalah bupati/wali kota/gubernur

**Televisi, radio dsb**, adalah acara televisi/radio yang memberitakan tentang pilihan bupati/wali kota/gubernur.

**Kampanye**, adalah kampanye pemilihan yaitu kegiatan dalam rangka menyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

**Lainnya**, adalah sumber informasi tentang diadakannya pemilihan bupati/wali kota/ gubernur yang bersumber dari teman, saudara, dsb.

**Pertanyaan 403A: Lihat jawaban Pertanyaan 403.a**

Tuliskan kode oada kotak yang tersedia sesuai dengan jawaban pada pertanyaan 403.a. Bila jawaban berkode 2, lanjutkan ke pertanyaan 406.A.

**Pertanyaan 404: Siapa penyelenggara penyuluhan?**

Tanyakan kepada responden, siapa penyelenggara sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

**KPUD/PPK/DPS**, adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

**Tokoh agama**, adalah seseorang yang diadakan panutan masyarakat sekitar agamanya, misalnya kyai, pendeta dsb. tokoh masyarakat adalah orang yang menjadi panutan di masyarakat, karang taruna.

**Lainnya**, seperti aparat pemerintahan desa/kelurahan/kecamatan, RT/RW dan lain lain.

**Pertanyaan 405: Sarana apa yang digunakan untuk kegiatan penyuluhan?**

Tanyakan kepada responden, sarana apa yang digunakan untuk melakukan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

**Forum keagamaan**, adalah suatu forum keagamaan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat seperti majelis taklim, ibadah sektor dll.

**Mengumpulkan masyarakat**, adalah untuk menyampaikan sosialisasi mengenai pelaksanaan pemilihan kepala daerah penyelenggara mengumpulkan masyarakat.

**Lainnya**, adalah melalui mass media elektronik maupun cetak

**Pertanyaan 406: Materi apa saja yang diberikan waktu penyuluhan?**

Tanyakan kepada responden, materi apa saja yang diberikan ketika diadakan penyuluhan. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

**Tahapan pelaksanaan pilkada**, adalah memberi penjelasan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan pilkada

**Cara memilih/pencoblosan**, adalah memberi penjelasan mengenai cara pencoblosan calon-calon kepala daerah pada waktu pemungutan suara.

**Pertanyaan 406.A: Lihat Jawaban Pertanyaan 403.b.**

Tuliskan kode pada kotak yang tersedia sesuai jawaban pada **pertanyaan 403.b**. Bila jawaban berkode 2, lanjutkan **ke pertanyaan 408**.

**Pertanyaan 407: Dimana Anda pernah melihat dipasang pemberitahuan tentang diadakan pemilihan Bupati/Wali kota/Gubernur di daerah Anda?**

Tanyakan kepada responden, dimana saja responden pernah melihat pemberitahuan tentang akan diadakan pemilihan kepala daerah. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

**Pertanyaan 408: Apakah Anda mengetahui adanya pendaftaran pemilih untuk pemilihan Bupati/Wali kota/Gubernur?**

Tanyakan kepada responden, apakah responden mengetahui adanya pendaftaran pemilih bupati/wali kota/gubernur. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

**Pertanyaan 409: Apakah anda terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Bupati/ Wali kota/ Gubernur?**

Tanyakan kepada responden, apakah responden terdaftar dalam pemilihan bupati/wali kota/gubernur. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia. Bila jawaban berkode 2 lanjutkan ke pertanyaan 411.

**Pertanyaan 409A: Lihat jawaban Pertanyaan 408**

Tuliskan kode pada kotak yang tersedia sesuai jawaban pada pertanyaan 408. Bila jawaban berkode 2 langsung **ke pertanyaan 411.**

**Pertanyaan 410: Kapan Anda didaftar sebagai pemilih dalam pemilihan Bupati/ Wali kota/Gubernur?**

Tanyakan kepada responden, kapan responden didaftar dalam pemilihan bupati/wali kota/gubernur. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

**Pada saat pendaftaran pemilih pemilu 2004,** adalah responden yang didaftar oleh petugas pendaftaran pemilih pada saat pendaftaran pemilih untuk pemilu legislatif dan presiden.

**Pada saat pendaftaran pemilih untuk Pilkada,** adalah responden yang didaftar/ mendaftar sebagai pemilih pada saat KPUD melakukan pemutakhiran daftar pemilih dari pemilu terakhir.

**Setelah pengumuman daftar pemilih sementara,** adalah responden yang didaftar/ mendaftar sebagai pemilih setelah daftar pemilih sementara untuk pilkada diumumkan.

**Tidak tahu,** adalah responden tidak mengetahui kapan dirinya didaftar.

**Pertanyaan 411: Apakah alasan Anda sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih?**

Tanyakan alasan responden sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan bupati/wali kota/gubernur. Bila pertanyaan 411 berkode 3, lanjutkan ke **pertanyaan 418**.

**Pertanyaan 412: Apakah Anda berusaha mendaftar sebagai pemilih?**

Rincian ini ditanyakan kepada responden yang tidak terdaftar sebagai pemilih bupati/ wali kota/gubernur. Tanyakan kepada responden, alasan responden sehingga tidak terdaftar sebagai pemilih bupati/wali kota/gubernur. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia. Bila pertanyaan 412 berkode 2, **lanjutkan ke pertanyaan 418**.

**Pertanyaan 413: Bagaimana usaha Anda agar terdaftar sebagai pemilih?**

Pertanyaan ini ditanyakan bila P.412 berkode 2. Tanyakan kepada responden, bagaimana usaha responden terdaftar sebagai pemilih. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia, serta lanjutkan ke **pertanyaan 418**.

**Mendaftarkan diri ke RT/RW** adalah responden mendaftarkan diri sebagai pemilih melalui RT/RW

**Mendaftarkan diri ke PPK/PPS** adalah responden mendaftarkan diri sebagai pemilih melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemungutan Suara (PPS).

**Mendaftarkan diri ke kantor desa/kelurahan/kecamatan** adalah mendaftarkan diri sebagai pemilih melalui kantor desa/kelurahan/kecamatan

**Lainnya**, misalnya melalui partai politik, KPUD

**Pertanyaan 414: Apakah Anda mempunyai kartu identitas diri yang digunakan untuk pemilihan Bupati/Wali kota/Gubernur?**

Tanyakan apakah responden punya kartu identitas diri yang digunakan untuk pemilihan bupati/wali kota/gubernur. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia. Bila pertanyaan 414 berkode 2, lanjutkan **ke pertanyaan 418**.

**Pertanyaan 415: Identitas diri yang digunakan untuk pencoblosan dalam pemilihan Bupati/Wali kota/Gubernur?**

Tanyakan identitas diri yang digunakan pada saat pencoblosan dalam pemilihan bupati/ wali kota/gubernur. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia. **Bila P.415 berkode 2 atau 3 atau 4, lanjutkan ke P.417**

**Pertanyaan 416: Apakah kartu pemilih tersebut sesuai dengan identitas diri Anda?**

Tanyakan kartu pemilih yang digunakan pada saat pencoblosan dalam pemilihan bupati/ wali kota/gubernur sesuai dengan identitas diri responden. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia, serta lanjutkan **ke pertanyaan 418**.

**Pertanyaan 417: Apakah alasan Anda tidak menggunakan kartu pemilih pada saat pencoblosan?**

Tanyakan alasan responden pada saat pencoblosan dalam pemilihan bupati/wali kota/ gubernur tidak menggunakan kartu pemilih. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia

**Pertanyaan 418: Apakah Anda mengetahui ada tetangga yang tidak terdaftar sebagai pemilih Bupati/Wali kota/Gubernur?**

Tanyakan apakah ada tetangga responden yang tidak terdaftar dalam pemilihan bupati/ wali kota/gubernur. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

**Pertanyaan 419: Berapa pasang calon Bupati/Wali kota/Gubernur yang anda ketahui mendaftar ke KPUD?**

Tanyakan berapa pasang calon kepala daerah dalam pemilihan bupati/wali kota/gubernur yang diketahui responden. **Jika tidak tahu berikan kode 8, lanjut ke P.422**. Tuliskan jawaban pada kotak yang tersedia.



**Pertanyaan 420: Berapa pasang calon pemilihan Bupati/Wali kota/Gubernur yang sudah diterima di KPUD yang anda ketahui?**

Tanyakan berapa pasang calon kepala daerah dalam pemilihan bupati/wali kota/gubernur (sudah diterima KPUD) yang diketahui responden. **Jika tidak tahu berikan kode 8, lanjut ke P.422.** Tuliskan jawaban pada kotak yang tersedia.

**Pertanyaan 421: Sebutkan nama partai politik yang mengusulkan pasang calon Bupati/Wali kota/Gubernur yang menjadi kontestan?**

Tanyakan **nama partai politik** yang mengusulkan pasangan calon bupati/wali kota/ gubernur yang menjadi kontestan. Tuliskan maksimal lima partai politik yang mengusulkan pasangan calon kepala daerah tersebut dan isikan jumlah partai yang disebutkan dengan benar pada kotak yang tersedia.

**Pertanyaan 422: Sebutkan nama kontestan pada pemilihan Bupati/Wali kota/ Gubernur di daerah Anda?**

Tanyakan nama pasangan calon bupati/wali kota/gubernur di daerah anda yang telah terpilih. Tuliskan maksimal 5 nama pasang kontestan pada tempat yang disediakan dan isikan jumlah yang namanya disebutkan dengan benar pada kotak yang tersedia.

**Pertanyaan 423: Dari mana mengetahui kontestan pada pemilihan Bupati/ Wali kota/ Gubernur tersebut?**

Tanyakan dari mana responden mengetahui kontestan pada pemilihan bupati/wali kota/ gubernur. Tuliskan kode jawaban yang sesuai pada kotak yang tersedia.

#### **Blok IV B. Kampanye Pemilihan Bupati/Wali kota/Gubernur 2005**

Pertanyaan pada sub blok ini memuat pertanyaan tentang kampanye pemilihan bupati/wali kota/gubernur. Kampanye pemilihan bupati/wali kota/gubernur adalah semua kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah.

**Pertanyaan 424: Apakah Anda pernah menghadiri/ikut kampanye dalam pemilihan Bupati/Wali kota/Gubernur di daerah Anda?**

Tanyakan apakah responden pernah ikut berkampanye dalam pemilihan bupati/wali kota/ gubernur. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia. Jika jawaban berkode 2, lanjutkan ke **Pertanyaan. 428.**

**Pertanyaan 425: Bentuk kampanye yang Anda pernah ikuti dalam pemilihan Bupati/ Wali kota/Gubernur?**

Tanyakan bentuk kampanye yang anda pernah ikuti dalam pemilihan bupati/wali kota/ gubernur. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

**Pertemuan terbatas**, adalah dilaksanakan dalam ruangan atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup, jumlah peserta tidak melampaui kapasitas sesuai dengan jumlah tempat duduk, dengan peserta pendukung dan atau undangan lainnya yang bukan pendukung dan hanya dibenarkan membawa nomor urut dan foto pasangan calon.

**Tatap muka dan dialog**, yaitu yang sifatnya dialog interaktif dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat.

**Penyebaran/penyiaran melalui media cetak/elektronik**, dilaksanakan melalui media cetak/elektronik yang materi dan substansi pemberitaan/penyiarannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Penyebaran kampanye kepada umum**, dilaksanakan pada kampanye di tempat-tempat umum dengan menggunakan nomor urut dan gambar pasangan calon.

**Pasangan alat peraga**, dilaksanakan dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/ lokasi yang ditetapkan dan atau diizinkan oleh Pemerintah Daerah setempat, dan atau atas izin perintah tempat yang bersangkutan, dan pasangannya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan.

**Rapat umum**, dilaksanakan pada ruang terbuka yang dihadiri oleh masa dari pendukung dan warga masyarakat lainnya.

**Debat antar calon**, diselenggarakan oleh KPUD dengan materi penyampaian visi, misi dan program masing-masing pasangan calon.

**Lainnya**, adalah kampanye dalam bentuk lainnya yang tidak melanggar perundang-undangan misalnya dilaksanakan berupa hiburan yang mengandung unsur budaya.

**Pertanyaan 426: Apakah motivasi utama Andan mengikuti kampanye pemilihan Bupati/Wali kota/Gubernur tersebut?**

Tanyakan kepada responden, apakah yang menjadi motivasi utama mengikuti kampanye. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

**Mensukseskan kampanye,** adalah semua bentuk kegiatan yang mendukung acara pelaksanaan kampanye, sehingga berjalan dengan baik misalnya: membuat spanduk, pamflet dan media lainnya serta menyebarluaskan ke masyarakat umum;

**Mengetahui program dari calon kepada daerah,** adalah semua bentuk kegiatan yang mendukung materi penyampaian visi dan misi program masing-masing pasangan calon kepala daerah;

**Mendapatkan hiburan gratis,** adalah semua bentuk kegiatan untuk mendapatkan hiburan;

**Mendapatkan imbalan uang/barang,** adalah semua kegiatan yang mengharapkan imbalan berupa uang atau barang misalnya sembako yang tidak mencantumkan gambar (lambang) pasangan calon kepala daerah;

**Memperoleh berbagai atribut pasangan calon,** adalah semua bentuk kegiatan yang memperoleh berbagai atribut pasangan calon yang mencantumkan gambar (lambang) pasangan kepala daerah misalnya: baju, buku, topi dll;

**Diajak teman/ikut-ikutan,** adalah semua bentuk kegiatan karena pihak lain sebagai rasa solidaritas terhadap teman tanpa dibawah tekanan orang lain;

**Dipaksa pihak lain,** adalah semua bentuk kegiatan karena perasaan takut dibawah tekanan orang lain baik tekanan berupa fisik maupun psikis;

**Lainnya,** adalah semua bentuk kegiatan lainnya yang tidak melanggar perundang-undangan misalnya: simpatik terhadap figur kepala daerah, putra daerah dsb.

**Pertanyaan 427: Bagaimana sikap Anda setelah ikut kampanye pemilihan Bupati/ Wali kota/Gubernur tersebut?**

Tanyakan sikap responden setelah mengikuti kampanye pasangan calon peserta pemilihan bupati/wali kota/gubernur. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia, dan lanjutkan ke pertanyaan 429.

**Tetap dengan pilihan** adalah tanggapan atau penilaian responden terhadap pasangan calon partai peserta pemilihan setelah mengikuti kampanye.

**Menjadi ragu-ragu dengan pilihan** adalah seseorang yang telah ikut kampanye salah satu pasangan calon bupati/wali kota/gubernur belum menentukan/menetapkan pilihan pasangan calon yang biasanya disebabkan visi dan misi serta program partai tersebut masih belum sesuai dengan harapan responden (ragu menentukan pilihan).

**Tetap tidak ada pilihan** adalah seseorang yang telah ikut kampanye salah satu atau beberapa pasangan calon peserta pemilihan bupati/wali kota/gubernur tetap tidak akan memilih salah satu pasangan calon.

**Merubah pilihan** adalah seseorang yang telah ikut kampanye salah satu pasangan calon peserta bupati/wali kota/gubernur merubah pilihan biasanya dikarenakan visi dan misi serta program pasangan calon tersebut masih tidak sesuai dengan harapan responden.

**Tidak tahu/tidak terjawab** adalah seseorang yang telah ikut kampanye salah satu calon pasangan menjadi tidak tertarik untuk menetapkan pilihan terhadapnya, dikarenakan biasanya disebabkan karena visi dan misi serta program calon pilihan tidak sesuai dengan harapan responden.

**Pertanyaan 428: Apakah alasan utama Anda tidak ikut kampanye pemilihan Bupati/ Wali kota/Gubernur?**

Pertanyaan ini ditanyakan kepada responden yang tidak pernah mengikuti kampanye atau pertanyaan 424 berkode 2. Tuliskan kode jawaban, pada kode yang disediakan.

**Tidak tertarik**, adalah seseorang yang tidak pernah ikut kampanye karena tidak tertarik, baik dengan program atau visi dan misi yang ditawarkan oleh salah satu partai politik tertentu.

**Tidak ada waktu luang**, adalah seseorang yang tidak pernah ikut kampanye karena tidak mempunyai waktu luang tetapi sebenarnya ingin mengetahui program atau visi dan misi yang ditawarkan oleh salah satu partai politik tertentu.

**Tidak ada imbalannya**, adalah seseorang yang tidak pernah ikut kampanye karena tidak diberi imbalan oleh salah satu partai politik tertentu.

**Karena peraturan**, adalah seseorang yang tidak mungkin ikut kampanye karena dilarang oleh peraturan, misalnya PNS dan Anggota TNI/Polri

**Lainnya**, adalah seseorang yang tidak pernah ikut kampanye karena alasan lain, misalnya karena takut, sakit, buang-buang waktu dsb.

#### **Blok IV C. Pencoblosan dan Penghitungan Suara**

Sub blok ini memuat pertanyaan tentang pencoblosan dan penghitungan suara pemilihan bupati/wali kota/gubernur 2005. Pertanyaan mengenai pencoblosan dan penghitungan suara berkisar pada sosialisasi cara pencoblosan, penggunaan hak pilih dan pengenalan/pendapat terhadap pasangan calon kepala daerah.

##### **Pertanyaan 429: Berapa putaran pemilihan Bupati/Wali kota/Gubernur di daerah Anda?**

Tanyakan kepada responden berapa kali/putaran pemilihan kepala daerah di daerah anda. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia..

##### **Pertanyaan 430: Apakah anda menggunakan hak pilih dalam pemilihan Bupati/ Wali kota/Gubernur tersebut?**

Tanyakan apakah responden menggunakan hak pilih pada pemilihan bupati/wali kota/ gubernur. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia. Bila jawaban berkode 1, **lanjut ke P.432**.

**Menggunakan hak pilih pada pemilihan bupati/wali kota/gubernur** adalah seseorang yang mencoblos salah satu pasangan calon kepala daerah kertas suara yang disediakan baik yang dilakukan secara benar maupun salah.

##### **Pertanyaan 431: Apakah alasan utama anda tidak menggunakan hak pilih?**

Tanyakan apakah alasan utama responden tidak menggunakan hak pilih pada pemilihan bupati/wali kota/gubernur. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia, dan lanjutkan **ke pertanyaan 434**.

Pilihan jawaban yang disediakan untuk alasan tidak memilih pada pemilihan bupati/wali kota/gubernur adalah;

**Tidak ada calon yang dikenal** adalah seseorang yang tidak mengenal seluruh pasangan calon, sehingga tidak menggunakan hak pilih.

**Tidak terdaftar** yaitu seseorang yang tidak terdaftar sebagai pemilih sehingga tidak dapat menggunakan hak pilih.

**Tidak sempat datang/datang terlambat ke TPS** yaitu tidak menggunakan hak pilih karena datang ke TPS diluar waktu pencoblosan atau tidak sempat datang karena sesuatu hal, misalnya karena sakit, keperluan mendadak.

**Tidak punya hak pilih** yaitu seseorang yang tidak menggunakan hak pilih karena peraturan tidak memperbolehkan.

**Tidak ada yang sesuai** yaitu seseorang yang tidak menggunakan hak pilih karena menganggap tidak ada pasangan calon kepala daerah yang sesuai dengan hati nuraninya.

**Sedang bepergian/dinas** adalah seseorang yang tidak dapat menggunakan hak pilih karena sedang bepergian keluar kota untuk kepentingan pribadi atau dinas.

**Lainnya** adalah seseorang yang tidak menggunakan hak pilih karena alasan lain, seperti ikut-ikutan, tidak peduli, tidak punya alasan dsb.

**Pertanyaan 432: Apakah alasan utama anda memilih salah satu pasangan calon Bupati/ Wali kota/Gubernur tersebut?**

Pertanyaan ini **ditanyakan jika P.430 berkode 1**. Tanyakan kepada responden apakah ada paksaan untuk memilih salah satu pasangan calon kepala daerah. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

**Pertanyaan 433: Apakah Partai politik yang anda pilih pada Pemilu legislatif (April 2004)?**

Tanyakan partai politik pilihan responden pada Pemilu legislatif (April 2004) untuk DPRD kabupaten/kota, DPRD Propinsi dan DPR. Isikan nama partai politik pada tempat yang disediakan dan tuliskan kode partai sesuai nomor urutnya pada kotak yang disediakan. **Bila tidak memilih isikan kode 98** pada setiap kotak.

## **Blok V. Keamanan**

Blok ini memuat pertanyaan tentang masalah keamanan pada saat pendaftaran, kampanye, pencoblosan dan penghitungan suara pada pemilihan bupati/wali kota/ gubernur. Adapun pertanyaan-pertanyaan pada blok ini berisi sekitar pengalaman/ pengetahuan responden mengenai keamanan pada saat pemilihan bupati/wali kota/ gubernur.

### **Pertanyaan 501: Apakah anda mengetahui adanya gangguan keamanan di wilayah desa/kelurahan anda pada proses pemilihan pemilihan Bupati/ Wali kota/Gubernur?**

Tanyakan pada responden, apakah mengetahui adanya gangguan keamanan pada saat pelaksanaan kegiatan pemilihan bupati/wali kota/gubernur. Kegiatan Pemilu 2005 dimulai dari pendaftaran, kampanye, pencoblosan dan penghitungan hasil pemungutan suara.

**Mengetahui adanya gangguan keamanan** yaitu seseorang yang pada saat pelaksanaan tahapan-tahapan kegiatan Pemilu mengetahui telah terjadi gangguan keamanan di wilayah desa/kelurahan dimana responden berdomisili.

Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia. Bila jawaban responden berkode 2 lanjut ke P.601.

### **Pertanyaan 502: Jenis gangguan keamanan apa saja yang terjadi pada pelaksanaan kegiatan pemilihan Bupati/Wali kota/Gubernur?**

Tanyakan pada responden, jenis gangguan keamanan apa yang diketahui dan atau yang dialami pada saat pelaksanaan kegiatan pemilihan bupati/wali kota/gubernur. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

### **Pertanyaan 503: Jenis gangguan keamanan apa yang paling banyak kejadian pada saat pelaksanaan pemilihan Bupati/Wali kota/Gubernur di daerah anda?**

Pertanyaan ini ditanyakan jika P.502 yang berkode 1 lebih dari 1 buah jawaban. Tanyakan pada responden, jenis gangguan keamanan apa yang paling

banyak terjadi yang diketahui dan atau yang dialami pada saat pelaksanaan pemilihan bupati/wali kota/gubernur. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

**Pertanyaan 504: Bagaimana sifat gangguan keamanan tersebut?**

Tanyakan pada responden, sifat gangguan keamanan tersebut. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

**Pertanyaan 505: Apakah gangguan keamanan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan Bupati/Wali kota/Gubernur anda sampai menimbulkan korban jiwa( meninggal dunia )?**

Tanyakan pada responden, apakah gangguan keamanan yang terjadi pada saat pelaksanaan pemilihan bupati/wali kota/gubernur di wilayah pemilihan responden menimbulkan korban jiwa (meninggal dunia ). Tuliskan bila jawaban berkode 1 bila ya dan kode 2 bila tidak. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

**Blok VI. Sikap dan Harapan Masyarakat**

Blok ini memuat pertanyaan tentang sikap dan harapan masyarakat terhadap pasangan kepala daerah pemenang pemilihan bupati/wali kota/gubernur dilihat dari persepsi masing-masing responden. Pertanyaan-pertanyaan pada blok ini berisi tentang harapan responden terhadap pasangan calon pemenang Pilkada.

**Pertanyaan 601: Apakah Bupati/Wali kota/Gubernur yang terpilih sudah sesuai dengan pilihan anda?**

Tanyakan kepada responden apakah pasangan bupati/wali kota/gubernur yang terpilih sudah sesuai dengan pilihan responden. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

**Pertanyaan 602: Bagaimana sikap anda terhadap Bupati/Wali kota/Gubernur terpilih?**

Tanyakan kepada responden sikap terhadap pasangan bupati/wali kota/gubernur yang terpilih. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.



**Pertanyaan 603: Apakah Bupati/Wali kota/Gubernur terpilih sudah sesuai dengan harapan anda?**

Pertanyaan ini ditanyakan jika P.601 berkode 1. Tanyakan kepada responden apakah pasangan bupati/wali kota/gubernur terpilih sudah sesuai dengan yang diharapkan responden. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

**Pertanyaan 604: Bagaimana tanggapan anda terhadap Bupati/Wali kota/Gubernur terpilih dalam memajukan/mengembangkan daerah?**

Tanyakan kepada responden tanggapan terhadap pasangan bupati/wali kota/gubernur yang terpilih. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang telah tersedia.

**Optimis** adalah harapan terhadap seseorang yang diberikan sesuatu tanggungjawab/tugas dapat berjalan dengan baik

**Pertanyaan 605: Apakah prioritas harapan anda pada pasangan Bupati/Wali kota/ Gubernur terpilih?**

Tanyakan kepada responden apakah yang menjadi prioritas harapan terhadap pasangan bupati/wali kota/gubernur yang terpilih. Tuliskan kode jawaban pada kotak yang tersedia.

**Blok VII. Catatan**

Blok ini mencatat hal-hal yang penting pada saat pencacahan.